



BU
mn

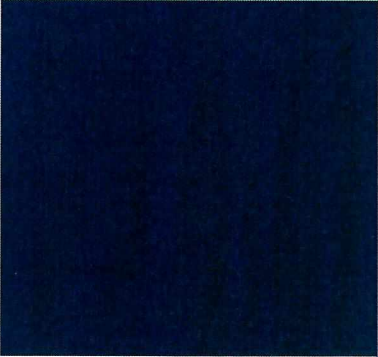
KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

BUMN UNTUK
INDONESIA

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA

2024



Daftar Isi

02	Kata Pengantar
04	Profil Pejabat
10	Ringkasan Eksekutif
14	BAB I Pendahuluan
21	BAB II Perencanaan Kinerja
27	BAB III Penilaian Kinerja
61	BAB IV Penutup
63	Lampiran

Kata Pengantar



BUMN tidak hanya berkontribusi secara ekonomi, tetapi juga memberikan nilai sosial yang nyata bagi masyarakat Indonesia.

ERICK THOHIR

Menteri Badan Usaha Milik
Negara

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kementerian BUMN dapat melaksanakan program-program yang direncanakan pada tahun 2024 dengan baik dan menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2024.

Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas Kementerian BUMN atas pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran tahun 2024. Di dalamnya tersaji informasi mengenai target dan capaian kinerja, hambatan yang dihadapi, langkah perbaikan yang telah dilakukan, serta kinerja anggaran, kaleidoskop kegiatan, dan berbagai pencapaian lainnya sepanjang tahun berjalan.

Sepanjang tahun 2024, Kementerian BUMN terus mendorong transformasi dan inovasi BUMN melalui implementasi 5 Prioritas Utama Kementerian BUMN, selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, BUMN tidak hanya berkontribusi secara ekonomi, tetapi juga memberikan nilai sosial yang nyata bagi masyarakat Indonesia.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Kementerian/Lembaga, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang telah mendukung capaian kinerja Kementerian BUMN.

Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi Kementerian BUMN karena menandai akhir dari peran historis sebagai pengelola langsung portofolio BUMN. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN, maka 2024 merupakan tahun terakhir Kementerian BUMN menjalankan peran sebagai *portfolio manager*. Mulai tahun 2025, Kementerian BUMN akan bertransformasi menjadi regulator yang bertugas menetapkan kebijakan, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi pengelolaan BUMN, serta menjalankan hak istimewa atas saham Seri A Dwiwarna sebagai kuasa Pemerintah Republik Indonesia.

Transformasi ini membawa perubahan mendasar menuju tata kelola BUMN yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Peran baru Kementerian BUMN sebagai regulator yang *mission-aligned* menempatkannya sebagai pengarah strategis bagi BUMN dalam melaksanakan penugasan pada program strategis Presiden guna mencapai misi pembangunan nasional. Fungsi regulator ini tidak hanya bersifat normatif dan administratif, tetapi juga berbasis misi publik—yaitu mendorong BUMN untuk secara konsisten menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial bagi rakyat Indonesia.

Dengan pendekatan ini, Kementerian BUMN akan mengarahkan kebijakan dan pengawasan agar seluruh BUMN berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti pemerataan ekonomi, ketahanan energi dan pangan, dan hilirisasi industri. Penguatan fungsi regulator yang *mission-aligned* juga akan membawa tata kelola BUMN Indonesia sejajar dengan praktik terbaik global dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pegawai Kementerian BUMN dan insan BUMN atas dedikasi, integritas, dan komitmen dalam mengimplementasikan nilai-nilai AKHLAK dan BerAKHLAK yang berkontribusi nyata terhadap kinerja dan reputasi Kementerian.

Kami membuka diri terhadap masukan dan saran yang konstruktif demi peningkatan kinerja di masa mendatang. Semoga laporan ini menjadi sarana refleksi dan pemacu semangat untuk memperkuat kontribusi Kementerian BUMN dan BUMN dalam mewujudkan visi Indonesia maju.

Jakarta, Maret 2025
MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA



ERICK THOHIR

Profil Pejabat

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lahir pada tanggal 30 Mei 1970, beliau ditunjuk sebagai Menteri BUMN sejak tanggal 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Kemudian beliau dilantik kembali sebagai Menteri BUMN pada 21 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Beliau turut dipercaya menjabat Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi, wakil Indonesia di International Basketball Federation (FIBA) dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Erick Thohir meraih *Bachelor of Arts* dari Glendale University pada tahun 1991 dan menyelesaikan gelar *Master of Business Administration* dari National University of California pada tahun 1993.

Sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mahaka Media Tbk (2010-2019), Presiden Klub Inter Milan (2013-2016), Direktur Utama PT Intermedia Capital Tbk (2014-2019), Ketua Komite Olimpiade Indonesia (2015-2019), dan Ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee/INASGOC (2018).



KARTIKA WIRJOATMODJO

WAKIL MENTERI BUMN

Lahir pada tanggal 18 Juli 1973, beliau ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN II pada kabinet Indonesia Maju sejak tanggal 25 Oktober 2019. Kemudian beliau dilantik kembali sebagai Wakil Menteri BUMN pada 21 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2024.

Kartika Wirjoatmodjo meraih gelar sarjana di Bidang Akuntansi pada tahun 1996 dari Universitas Indonesia (UI) dan menyelesaikan gelar *Master of Business* di Rotterdam School of Management, Erasmus University pada tahun 2001.

Karir sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN antara lain adalah sebagai Presiden Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance (2011-2013), Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (2014-2015), Direktur *Finance & Strategy* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016), dan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016 - 2019).



DONY OSKARIA

WAKIL MENTERI BUMN

Dony Oskaria dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN pada 20 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Beliau merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (1996) dan MBA dari Asian Institute of Management, Filipina (2009).

Pria kelahiran Sumatera Barat, 26 September 1969 ini pernah menjabat sebagai Direktur Utama InJourney periode 2021-2024, CEO *Hospitality & Entertainment* CT Corp, Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia, dan Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.



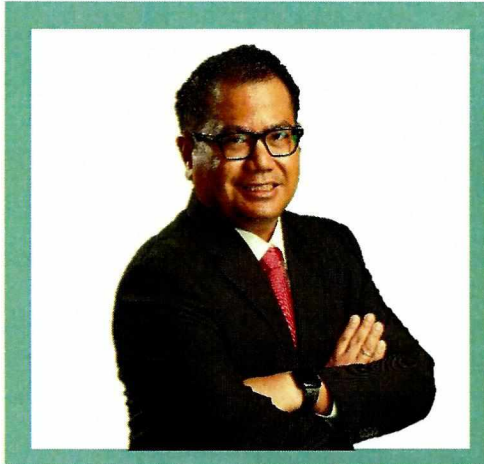
AMINUDDIN MA'RUF

WAKIL MENTERI BUMN

Aminuddin Ma'ruf dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN pada 20 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Pria kelahiran Karawang, 27 Juli 1986 ini merupakan Staf Khusus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada periode 2020-2023. Ia pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia periode 2014-2016.

Aminuddin menyelesaikan pendidikan S1 nya di Universitas Negeri Jakarta dan sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Airlangga hingga saat ini.



RABIN INDRAJAD HATTARI

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN

Lahir pada tanggal 26 Maret 1975, beliau ditunjuk sebagai Sekretaris Kementerian BUMN pada tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/TPA Tahun 2023.

Rabin Indrajad Hattari memperoleh gelar *Bachelor of Arts* bidang Ekonomi dan Matematika dari The University of Georgia pada tahun 1996, Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 2000 serta meraih gelar *PhD in Economics* di George Mason University pada tahun 2008.

Sebelum menduduki posisi saat ini, beliau merupakan Staf Ahli Bidang Industri sejak 12 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021. Beliau juga pernah berkarir di Asian Development Bank (ADB) Manila sejak tahun 2010 dengan posisi terakhir sebagai *Senior Economist*, Regional Cooperation and Integration Division, Sustainable Development and Climate Change Department (SDCC) (2019-2020) serta memiliki pengalaman sebagai Analis di The World Bank Washington DC (2007-2010) dan International Monetary Fund Washington DC (2002-2007).



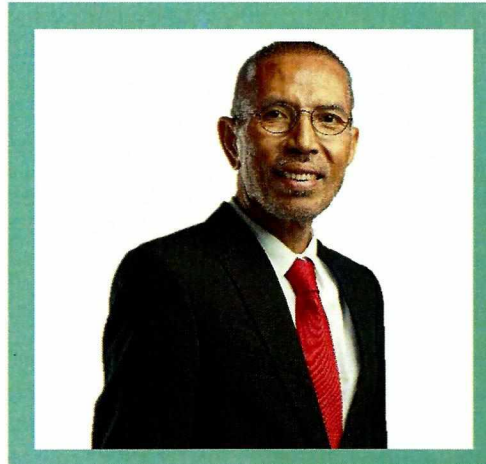
TEDI BHARATA

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,
TEKNOLOGI, DAN INFORMASI

Lahir pada tanggal 31 Mei 1983, beliau ditunjuk sebagai Deputy Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN sejak 5 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian BUMN.

Tedi Bharata meraih gelar Sarjana bidang Komputer dan Sistem Manajemen Informasi dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 1992 dan menyelesaikan *Master of Public Administration* di Columbia University pada tahun 2016.

Karir sebelum menjabat sebagai Deputy Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, antara lain menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN (2021), *Vice President Office of The Board* MIND ID (2019 - 2020) dan *Investment Planning Manager* - Telematic Industry Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016 - 2019).



ROBERTUS BILLITEA

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Pria kelahiran 4 Agustus 1966 ini meraih gelar S1 di Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1990 dan gelar S2 di bidang yang sama dari Universitas Padjajaran pada tahun 2009.

Beliau dilantik sebagai Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 7 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor : 122/TPA Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sebelumnya, beliau merupakan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG (2020-2023). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bahana Sekuritas (2020), Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2023), dan Komisaris PT Bahana Mitra Investa sejak (2020).



NAWAL NELY

DEPUTI BIDANG MANAJEMEN RISIKO DAN
KEPATUHAN

Lahir pada tanggal 12 Mei 1973, beliau ditunjuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 sebagai Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 12 November 2024.

Nawal Nely meraih gelar sarjana di Bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan *Executive Master of Business Administration* di INSEAD pada tahun 2019.

Karir sebelum menjabat sebagai Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai *Manager National Bank of Kuwait* (2005-2006), *Manager Ernst & Young – Doha* (2007-2008), *Senior Manager Ernst & Young Egypt – Cairo* (2009-2010), dan *Partner Ernst & Young Indonesia* (2010-2020).

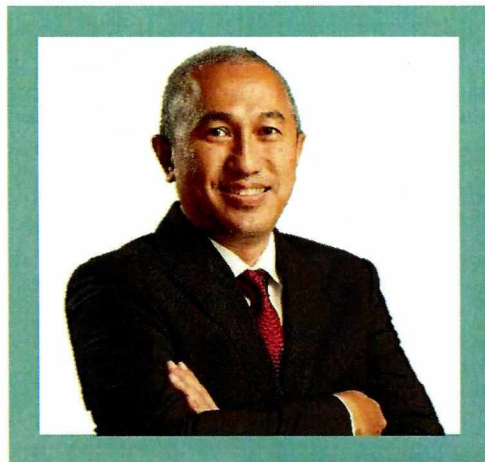


DWI ARY PURNOMO

PLT. DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO

Lahir di Jakarta, 26 Februari 1975, beliau meraih gelar Sarjana di Bidang Akuntansi, Universitas Borobudur dan menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia pada tahun 2011.

Beliau ditunjuk sebagai Plh. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko sejak 13 November 2024 dan menjadi Plt. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko sejak 16 Januari 2025. Sebelum menduduki posisi saat ini, beliau pernah menjadi Asisten Deputi Layanan Hukum BUMN (2016-2017), Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib (2015-2016), Kepala Bidang Usaha Perkebunan II (2014-2015), Kepala Bidang Usaha Jasa IIIa (2013-2014), dan Kepala Bidang Administrasi dan Kekayaan BUMN (2010-2013).



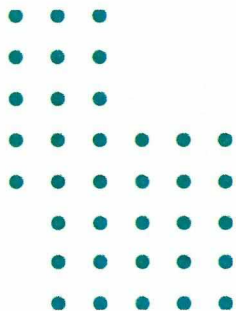
ANDUS WINARNO

STAF AHLI BIDANG INDUSTRI

Lahir di Kabupaten Kebumen, 14 September 1971, beliau meraih gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang, dan menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012.

Beliau dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Industri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor : 122/TPA Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Karir sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Industri antara lain, Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia di Kementerian BUMN (2021-2023), Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Eksekutif BUMN (2019-2020), Asisten Deputi Data dan Teknologi Informasi (2016-2019), Kepala Bidang Kebijakan Sumber Daya Manusia Eksekutif BUMN (2015-2016), Kepala Bidang Kebijakan SDM Eksekutif BUMN (2014-2015), Kepala Bidang Usaha Industri Primer IIIb (2013-2014), dan Kepala Bidang usaha Infrastruktur dan Logistik IIb (2010-2013).





LOTO SRINAITA GINTING

STAF AHLI BIDANG KEUANGAN DAN
PENGEMBANGAN UMKM

Lahir pada tanggal 7 Mei 1967, beliau ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020.

Loto Srinaita Ginting meraih gelar sarjana di Bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1992 dan menyelesaikan *Master of Commerce in Economics* di University of New South Wales pada tahun 2000.

Karir sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai Direktur Surat Utang Negara di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (2012 – 2015) dan Direktur Surat Utang di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (2015 – 2020).



WAHYU SETYAWAN

STAF AHLI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
STRATEGIS

Lahir di Jakarta, 9 September 1974, beliau meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dan menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Hukum, Niigata University pada tahun 2008.

Beliau dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor : 122/TPA Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Karir sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis, antara lain adalah Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan (2020-2023), dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan (2015-2020).

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara selama tahun 2024 merupakan keberlanjutan dari kebijakan tahun 2023 dengan berbagai perbaikan dan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 dalam rangka transformasi berkelanjutan untuk mendukung pencapaian seluruh visi dan misi Kementerian BUMN.



Capaian Kinerja

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kementerian BUMN telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 16 IKU tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 7 IKU berhasil terealisasi di atas target;
- 6 IKU berhasil terealisasi sesuai target;
- 3 IKU terealisasi di bawah target.

Rincian realisasi IKU pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian BUMN tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tujuan I : Mewujudkan Kementerian BUMN sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional

Sasaran Kinerja 1 : Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	11%	7,39%	67,18%

Sasaran Kinerja 2 : Menciptakan Organisasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	Memuaskan	Memuaskan	100,00%
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	120,00%*

Tujuan II : Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN

Sasaran Kinerja 3 : Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
4	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	50,00%	89,36%	120,00%*
5	Persentase penyelesaian program Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP)	50,00%	50,00%	100,00%

Sasaran Kinerja 4 : Penguatan Kapasitas BUMN

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
6	Nilai PMN Non Tunai yang berasal dari konversi utang pemerintah	Rp0,65 Triliun	Rp0,65 Triliun	100,00%

Tujuan III : Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN

Sasaran Kinerja 4 : Meningkatnya Daya Saing BUMN

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
7	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	54 Negara	101 Negara	120,00%*

Sasaran Kinerja 5 : BUMN Unggul di Kancan Global

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
8	Jumlah BUMN yang masuk peringkat Global	5 BUMN	5 BUMN	100,00%
9	Pembentukan Holding BUMN	1 Holding	1 Holding	100,00%

Tujuan IV : Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**Sasaran Kinerja 7 : Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
10	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp630,63 triliun	Rp684,87 triliun	108,60%

Sasaran Kinerja 8 : Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
11	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp318,61 triliun	Rp327,70** triliun	102,85%
12	Persentase penyelesaian tahapan progress Proyek PSN untuk tahun 2024 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN	88,00%	80,11%	91,03%
13	Persentase penyelesaian tahapan progres Proyek SDU untuk tahun 2024 diluar PSN	100%	87,90%	87,90%
14	Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep <i>Creating Shared Value (CSV)</i>	90,00%	90,00%	100,00%
15	Jumlah UMKM Mitra Binaan yang naik kelas	5.750	8.449	120,00%*

Sasaran Kinerja 9 : Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
16	Net Profit	Rp238,37 triliun	Rp304** triliun	120,00%*

Rata – Rata Capaian**103,60%****Keterangan:**

* : Apabila % capaian di atas 120%, maka akan terhitung 120%.

** : *Unaudited 2024*

Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2024

Untuk mendukung capaian-capaian yang telah ditetapkan, Kementerian BUMN didukung dengan anggaran tahun 2024 yang dapat dirinci sebagai berikut:

No	IKU	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Wakil Menteri BUMN	13.463.614.000	13.370.515.434	99,31%
2	Sekretariat Kementerian BUMN	203.320.769.000	199.626.007.830	98,18%
3	Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko	17.324.005.000	17.223.298.898	99,42%
4	Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	4.274.739.000	4.190.552.902	98,03%
5	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi	63.177.599.000	62.600.894.681	99,09%
Total		308.016.126.000	301.560.726.000	98,49%

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN
TAHUN 2024



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang vital dalam menjalankan peran terhadap kekuatan mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal tersebut pada intinya menekankan bahwa cabang-cabang produksi yang strategis untuk negara dan kebutuhan hidup masyarakat harus dikuasai oleh negara, serta sumber daya alam seperti tanah, air, dan kekayaan alam lainnya harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara maksimal. Penguasaan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan monopoli, tetapi untuk memastikan kebutuhan hidup semua warga negara Indonesia terpenuhi.

Pengurusan BUMN dilakukan oleh Menteri BUMN yang berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh modal Persero dimiliki negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara, serta sebagai pemilik modal pada Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian BUMN antara lain:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.



Dalam melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan adanya akuntabilitas kinerja yang baik dan memiliki budaya pelayanan yang kuat agar dapat berhasil dalam menjalankan program-program pembangunan yang strategis dan berdampak besar bagi masyarakat sehingga dapat memenuhi hakikat pendirian BUMN secara efektif. Bentuk akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN salah satunya dapat tergambarkan pada Laporan Kinerja Kementerian BUMN yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri BUMN dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Laporan kinerja mencerminkan komitmen organisasi dan pimpinan untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan informasi yang akurat dan terbuka kepada pemangku kepentingan. Dengan memperhatikan faktor tersebut, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menyusun laporan kinerja yang informatif, relevan, dan bermakna bagi perkembangan dan pertanggungjawaban kinerja.



Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN, Kementerian BUMN memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

● Kedudukan

Kementerian BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri BUMN dan dibantu oleh Wakil Menteri BUMN sesuai dengan penunjukan presiden.

● Tugas

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

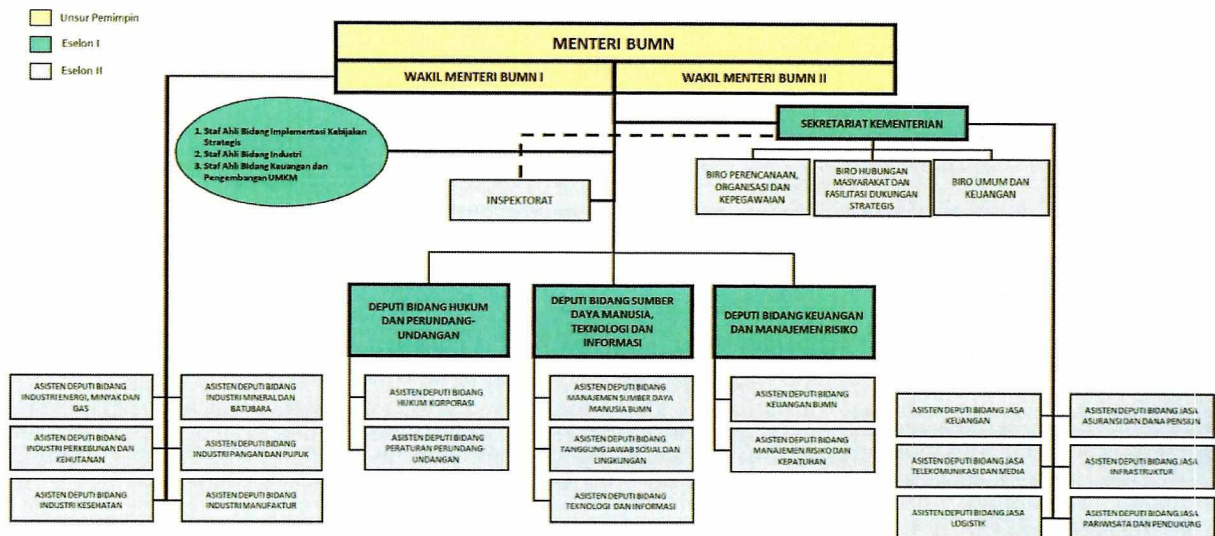
● Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko Badan Usaha Milik Negara;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko Badan Usaha Milik Negara;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Kementerian BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN ditetapkan sebagai berikut.



Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Menteri BUMN dibantu oleh Wakil Menteri BUMN dan membawahi 4 (empat) Unit Kerja Eselon I. Adapun rincian tugas dan fungsi Wakil Menteri BUMN dan Unit Kerja sebagai berikut:

1 Wakil Menteri BUMN

Selain membantu Menteri BUMN dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian BUMN, Wakil Menteri BUMN juga melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN yang meliputi:

- Perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Industri dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri; dan
- Perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara sektor Jasa dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa.

Dalam melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN, Wakil Menteri BUMN menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Industri dan Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri dan Jasa.

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Industri dan Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri dan Jasa;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Industri dan Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri dan Jasa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2 Sekretaris Kementerian BUMN

Sekretariat Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian BUMN;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian BUMN;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian BUMN;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian BUMN;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pengelolaan data dan informasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3 Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko

Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keuangan dan Manajemen Risiko BUMN;

- d. Pengawasan atas kinerja, administratif, dan manajemen risiko BUMN; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4

Deputi Hukum dan Perundang - Undangan

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

5

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, dan informasi BUMN.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang penataan direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas BUMN dan anak perusahaan/perusahaan patungan, pengelolaan manajemen talenta BUMN, penataan sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN sebagai calon direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, indikator kinerja direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, pemberian penghargaan dan sanksi, remunerasi direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, dan hubungan industrial BUMN serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) BUMN;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas BUMN dan anak perusahaan/perusahaan patungan, pengelolaan manajemen talenta BUMN, penataan sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN sebagai calon direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, indikator kinerja direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, pemberian penghargaan dan sanksi, remunerasi direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, dan hubungan industrial BUMN serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) BUMN;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan tanggung jawab sosial BUMN; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sistematika Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Kementerian BUMN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas Nasional, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.



BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.



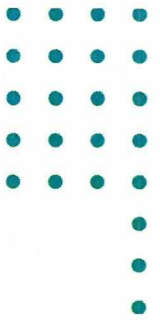
LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN
TAHUN 2024



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Rencana Strategis Tahun 2020-2024



Sebagai tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memiliki peran yang strategis. Capaian atas RPJMN 2020-2024 akan menentukan ketercapaian target pembangunan yang tertuang dalam RPJPN seperti pendapatan per kapita Indonesia yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC), kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik

Sesuai amanah RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut dicerminkan melalui Tema Pembangunan Nasional, yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 tersebut, Kementerian BUMN telah merumuskan visi misi Kementerian dalam suatu Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.

Visi Kementerian BUMN



"Mewujudkan Kementerian BUMN yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Visi tersebut sekaligus menjadi manifestasi komitmen Kementerian BUMN untuk mendukung agenda nasional.



Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, terdapat lima hal utama yang menjadi fokus pembangunan selama 2020-2024, yaitu:



Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung kerja sama industri dan talenta global.



Pembangunan Infrastruktur

Fokus utama pembangunan infrastruktur adalah melanjutkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sudah ada, khususnya dalam rangka menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.



Penyederhanaan Regulasi

Untuk mendorong pembangunan, segala bentuk regulasi yang menghambat iklim bisnis dan investasi perlu disederhanakan. Salah satu pendekatan yang dipakai adalah melalui penerbitan Omnibus Law. Secara khusus, terdapat dua Undang-Undang yang menjadi target Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.



Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, yaitu dengan cara memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.



Transformasi Ekonomi

Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan difokuskan untuk melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan arahan Presiden RI di atas, Kementerian BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham BUMN senantiasa mengoptimalkan pembinaan BUMN agar dapat memberikan kontribusi maksimal pada pencapaian visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN tahun 2020 – 2024 ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Renstra Kementerian BUMN merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dan merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran serta disusun berlandaskan tugas dan fungsi Kementerian BUMN.

Misi Kementerian BUMN

Untuk mewujudkan visi serta agenda pembangunan tersebut di atas, Kementerian BUMN melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN;
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian BUMN;
- 3) Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham; dan
- 4) Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian BUMN

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian BUMN yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan Sasaran Strategis Kementerian BUMN yang akan dicapai selama periode 2020-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan antara lain:

#Tujuan 1

Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional

- Sasaran Strategis:**
- 1) Menciptakan SDM yang unggul dan profesional.
 - 2) Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel.

#Tujuan 2

Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN

- Sasaran Strategis:**
- 1) Meningkatnya tata kelola BUMN sebagai korporasi.
 - 2) Penguatan Kapasitas BUMN

#Tujuan 3

Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN

- Sasaran Strategis:**
- 1) Meningkatnya daya saing BUMN.
 - 2) BUMN unggul di kancah global.

#Tujuan 4

Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

- Sasaran Strategis:**
- 1) Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (APBN).
 - 2) Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional.
 - 3) Kontribusi BUMN dalam peningkatan *value* BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)

Dalam rangka mendukung pencapaian keempat tujuan tersebut, Kementerian BUMN menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian BUMN pada tahun 2020-2024. Sembilan SS tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 19 (sembilan belas) IKU.

Matriks Kinerja Tahun 2020-2024

Dalam mencapai Sasaran Strategis, Kementerian BUMN telah menyusun Matriks Kinerja yang tertuang dalam Renstra Kementerian BUMN 2020 - 2024 sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS 1: Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	82,27	83,92	85,60	87,31	90,01
	Produktivitas tenaga kerja BUMN	3,07	3,16	3,25	3,35	3,45
	Rasio Keterwakilan perempuan dalam BOD/ BOC BUMN	9,00%	10,00%	11,00%	13,00%	15,00%
SS 2: Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40
	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SS 3: Meningkatnya Tata Kelola BUMN Sebagai Korporasi	Rasio BUMN dengan Tingkat Kesehatan Kategori Sehat	77,00%	79,00%	81,00%	82,00%	84,00%
	Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100%
	Tingkat Kepatuhan BUMN dalam Menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100%
SS 4: Penguatan kapasitas BUMN	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	33 BUMN/Anak	35 BUMN/Anak	37 BUMN/Anak	39 BUMN/Anak	50 BUMN/Anak
	Penyelesaian restrukturisasi hutang BUMN (RDI, SLA, hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	15,00%	25,00%	50,00%	70,00%	80,00%
SS 5: Meningkatnya Daya Saing BUMN	Peningkatan pasar BUMN ke luar negeri (Jumlah Negara)	30 Negara	36 Negara	42 Negara	48 Negara	54 Negara
	Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/ anak	10 BUMN	13 BUMN	17 BUMN	22 BUMN	30 BUMN
SS 6: BUMN Unggul di Kancan Internasional	Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	5 BUMN	5 BUMN	6 BUMN	6 BUMN	7 BUMN
	Pembentukan Holding BUMN	2 Holding	1 Holding	2 Holding	2 Holding	1 Holding
SS 7: Kontribusi BUMN terhadap penerimaan Negara (APBN)	Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, PNPB)	Rp365,53 triliun	Rp413,10 triliun	Rp472,72 triliun	Rp540,69 triliun	Rp682,50 triliun
SS 8: Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	Realisasi Belanja Modal (Capex) BUMN	Rp490,00 triliun	Rp532,00 triliun	Rp577,00 triliun	Rp627,00 triliun	Rp680,00 triliun
	Kontribusi BUMN pada pengembangan energi baru terbarukan	13,00%	14,70%	15,70%	16,80%	18,00%
SS 9: Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	Net Profit	Rp178,00 triliun	Rp199,00 triliun	Rp222,00 triliun	Rp248,00 triliun	Rp325,00 triliun
	Kapitalisasi Saham BUMN	Rp1.989,00 triliun	Rp2.198,00 triliun	Rp2.429,00 triliun	Rp2.684,00 triliun	Rp2.966,00 triliun

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian BUMN berisikan komitmen Menteri BUMN dalam rangka pencapaian SS, IKU, dan target Kementerian BUMN sehingga kinerja Kementerian BUMN menjadi lebih terukur. SS, IKU, dan target pada PK Kementerian BUMN Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2024
MEWUJUDKAN KEMENTERIAN BUMN SEBAGAI PEMBINA DAN PENGAWAS BUMN YANG PROFESIONAL	Sasaran Strategis 1: Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	
	1 Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	11,00%
	Sasaran Strategis 2: Menciptakan Organisasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel	
	2 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	Memuaskan
	3 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KORPORATISASI BUMN	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi	
	4 Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	50,00%
	5 Persentase penyelesaian program Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP)	50,00%
	Sasaran Strategis 4: Penguatan Kapasitas BUMN	
	6 Nilai PMN Non Tunai yang berasal dari Konversi Utang Pemerintah	Rp0,65 triliun
MENINGKATKAN KEUNGGULAN DAN DAYA SAING BUMN	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Daya Saing BUMN	
	7 Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	54 Negara
	Sasaran Strategis 6: BUMN unggul di kancah global	
	8 Jumlah BUMN yang masuk peringkat Global (Forbes 2000 dan Fortune 500)	5 BUMN
	9 Pembentukan <i>Holding</i> BUMN	1 <i>Holding</i>
MEMAKSIMALKAN KONTRIBUSI BUMN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN	Sasaran Strategis 7: Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	
	10 Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN)	Rp630,63 Triliun
	Sasaran Strategis 8: Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	
	11 Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp318,61 triliun
	12 Persentase penyelesaian tahapan progres PSN untuk tahun 2024 di seluruh klaster BUMN Binaan Kementerian BUMN	88%
	13 Persentase penyelesaian tahapan progres Proyek SDU untuk tahun 2024 di luar PSN	100%
	14 Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep <i>Creating Shared Value</i> (CSV)	90%
	15 Jumlah UMKM Mitra Binaan yang naik kelas	5.750 UMKM
	Sasaran Strategis 8: Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	
	16 <i>Net Profit</i>	Rp238,37 Triliun

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN
TAHUN 2024

Tahun
Merayakan



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam PK dengan realisasinya.

Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Adapun tingkat ketercapaian target-target Kementerian BUMN per Indikator disajikan sebagai berikut.

TUJUAN I : MEWUJUDKAN KEMENTERIAN BUMN SEBAGAI PEMBINA DAN PENGAWAS BUMN YANG PROFESIONAL

Sasaran Strategis 1: Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	11,00%	7,39%	67,18%

Sasaran Strategis 2 : Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	Memuaskan	Memuaskan	100,00%
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	120,00%

TUJUAN II : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KORPORATISASI BUMN

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
4	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	50,00%	89,36%	120,00%*
5	Persentase penyelesaian program Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP)	50,00%	50,00%	100,00%

Sasaran Strategis 4 : Penguatan Kapasitas BUMN

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
6	Nilai PMN Non Tunai yang berasal dari Konversi Utang Pemerintah	Rp0,65 Triliun	Rp0,65 Triliun	100,00%

TUJUAN III : MENINGKATKAN KEUNGGULAN DAN DAYA SAING BUMN**Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Daya Saing BUMN**

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
7	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	54 Negara	101 Negara	120,00%*

Sasaran Strategis 6 : BUMN Unggul di Kancan Global

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
8	Jumlah BUMN yang masuk peringkat Global	5 BUMN	5 BUMN	100,00%
9	Pembentukan <i>Holding</i> BUMN	1 <i>Holding</i>	1 <i>Holding</i>	100,00%

TUJUAN IV : MEMAKSIMALKAN KONTRIBUSI BUMN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN**Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Daya Saing BUMN**

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
10	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp630,63 triliun	Rp684,87 triliun	108,60%

Sasaran Strategis 8 : Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
11	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp318,61 triliun	Rp327,70** triliun	102,85%
12	Persentase penyelesaian tahapan progress PSN untuk tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN	88%	80,11%	91,03%
13	Persentase penyelesaian tahapan progress Proyek SDU untuk tahun 2023 di luar PSN	100%	87,90%	87,90%
14	Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep <i>Creating Shared Value</i> (CSV)	90%	90%	100,00%
15	Jumlah UMKM Mitra Binaan yang naik kelas	5.750	8.446	120,00%*

Sasaran Strategis 9 : Kontribusi BUMN dalam Peningkatan *Value* BUMN untuk Pemegang Saham

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
16	<i>Net Profit</i>	Rp238,37 triliun	Rp304** triliun	120,00%*
Rata-rata Capaian				103,60%

Keterangan:

* : Apabila % capaian di atas 120%, maka akan dihitung 120%.

** : Angka Unaudited 2024

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian BUMN Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan I :

Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional

Sasaran Strategis 1: Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	11%	7,39%	67,18%

1. Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Talenta Muda dalam Direksi BUMN/Total Direksi BUMN	9,85%	11,00%	7,39%	75,03%	67,18%

Di era perubahan yang begitu cepat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membutuhkan strategi dan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi masa depan. Salah satu kunci untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memberi ruang bagi Talenta Muda di jajaran Direksi. Generasi muda dikenal dengan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, terutama dalam hal transformasi digital. Dengan memasukkan talenta muda ke dalam jajaran direksi, BUMN dapat lebih cepat mengadopsi teknologi baru, mengoptimalkan digitalisasi, dan menciptakan layanan yang lebih efisien serta berbasis teknologi. Memasukkan talenta muda dalam jajaran direksi BUMN merupakan kebutuhan strategis karena Talenta Muda membawa inovasi, energi baru, pemikiran yang segar, serta pemahaman terhadap perkembangan teknologi dan pasar global. Dengan kombinasi yang tepat antara pengalaman dan semangat muda, BUMN dapat menjadi lebih lincah, kompetitif, dan relevan dalam menghadapi tantangan masa depan.

Adapun pencapaian realisasi Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN dalam beberapa tahun adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
9,85%	11,00%	7,39%	75,03%

Kementerian BUMN menargetkan keterwakilan Talenta Muda dalam jajaran Direksi BUMN dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda dalam memimpin serta menggerakkan kemajuan dan transformasi di BUMN sehingga mampu menjawab tuntutan dunia usaha yang semakin kompetitif. Pada tahun 2024, Talenta Muda yang menduduki jabatan Direksi BUMN tercapai 7,39% (19 Orang). Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh terbatasnya talenta-talenta muda dalam *Talent Pool* Kementerian BUMN yang siap menduduki jabatan Direksi BUMN. Kementerian BUMN terus mendorong peningkatan kepemimpinan Talenta Muda di grup BUMN (BUMN Induk, anak dan cucu perusahaan BUMN) melalui beberapa inisiatif, diantaranya:

- Meminta BUMN untuk menerapkan kepemimpinan muda dengan target 10% sampai dengan level Anak dan Cucu Perusahaan BUMN;
- Menjadikan Talenta Muda dalam *Nominated Talent* BUMN sebagai bagian dari indikator KPI yang diperjanjikan dalam Kontrak Manajemen;

Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2024

3. Pembentukan BUMN Muda dalam Forum *Human Capital* Indonesia sebagai wadah profesional para pimpinan dan talenta muda BUMN;
4. Pemberian program pengembangan bagi talenta muda melalui kolaborasi dengan BUMN *School of Excellence* dan Forum *Human Capital* Indonesia.

Terobosan transformasi untuk mendorong kepemimpinan muda tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan mengingat pengembangan talenta tidak hanya dilakukan pada manajemen puncak, namun harus dimulai secara berjenjang pada berbagai jenjang kepemimpinan. Meskipun masih terus didorong untuk dapat mencapai target yang ditetapkan, kami berpendapat bahwa hal terpenting yang harus dipastikan adalah program utamanya telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan secara terstruktur untuk seluruh level jabatan, sehingga diharapkan secara alamiah akan mendorong bibit-bibit kepemimpinan muda pada masa yang akan datang.

Sasaran Strategis 2 : Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	Memuaskan	Memuaskan	100,00%
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	120,00%

2. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian
1	2	3	4	4/2 4/3
Hasil Asesmen RB oleh Kementerian PAN-RB	86,04 (Memuaskan)	Memuaskan	Memuaskan	100% 100%

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian BUMN pada tahun 2024 diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan RB ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme perhitungan nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 mengikuti pendekatan yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan mengevaluasi dua dimensi utama: Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan.

Hasil evaluasi nilai Reformasi Birokrasi ini menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan instansi dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai tersebut dikategorikan sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kategori	Predikat
1.	Nilai >100	AA	Sangat Memuaskan
2.	Nilai >80 – 100	A	Memuaskan
3.	Nilai >70 – 80	BB	Sangat Baik

No.	Rentang Nilai	Kategori	Predikat
4.	Nilai >60 – 70	B	Baik
5.	Nilai >50 – 60	CC	Cukup
6.	Nilai >30 – 50	C	Kurang
7.	Nilai >0 – 30	D	Sangat Kurang

Pada tahun 2024, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhasil mencapai Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 90,23, yang termasuk dalam kategori A dengan predikat "Memuaskan". Pencapaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu mempertahankan predikat "Memuaskan". Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Kementerian BUMN dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang optimal dan mendukung percepatan Reformasi Birokrasi. Meskipun terjadi perubahan dalam mekanisme kebijakan evaluasi dan penilaian Reformasi Birokrasi, Kementerian BUMN mampu beradaptasi dengan cepat. Hal ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

- 1) **Komitmen Tinggi terhadap Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi yang Optimal,** Kementerian BUMN menunjukkan dedikasi yang kuat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari upaya-upaya sistematis untuk memperbaiki proses internal, dengan berhasil melakukan penyederhanaan struktur organisasi secara optimal, yang dibuktikan dengan skor sempurna pada indikator ini. Penyederhanaan ini telah menciptakan organisasi yang lebih ramping, efisien, dan responsif terhadap dinamika perubahan. Selain itu, terjadi peningkatan tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi yang juga mendukung percepatan proses kerja dan pengambilan keputusan. Peningkatan indeks tata kelola pengadaan dan indeks kualitas kebijakan menunjukkan bahwa Kementerian BUMN telah berhasil menciptakan sistem pengadaan yang lebih transparan serta kebijakan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan nasional.
- 2) **Peningkatan Akuntabilitas dan Pengendalian,** dalam aspek akuntabilitas, Kementerian BUMN berhasil meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), yang mencerminkan kinerja yang lebih terukur dan terarah. Selain itu, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga mengalami peningkatan yang menunjukkan penguatan sistem pengendalian internal untuk mencegah risiko dan memastikan transparansi. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas juga menjadi bukti komitmen Kementerian BUMN dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.

- 3) Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat dan Pelayanan Publik,** Kementerian BUMN mampu merespons tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Kementerian BUMN berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap tuntutan Masyarakat tersebut yang tercermin dari peningkatan indeks pelayanan publik. Responsivitas terhadap aspirasi masyarakat juga terlihat dari tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat melalui Aplikasi LAPOR!, di mana Kementerian BUMN berhasil meraih skor sempurna. Hasil survei kepuasan masyarakat yang meningkat juga menunjukkan bahwa layanan yang diberikan semakin diapresiasi oleh publik. Hal ini tidak hanya mendorong peningkatan nilai RB, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja instansi.
- 4) Adaptasi terhadap Transformasi Digital dan Inovasi,** perubahan mekanisme evaluasi dan penilaian Reformasi Birokrasi tidak menjadi penghalang bagi Kementerian BUMN, sebaliknya, hal ini menjadi momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja instansi. Menghadapi perubahan mekanisme evaluasi serta tuntutan masyarakat yang dinamis, Kementerian BUMN menjadikan transformasi digital sebagai salah satu fokus utama. Hal ini terbukti dengan peningkatan tingkat implementasi kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan indeks SPBE, yang menunjukkan keberhasilan Kementerian BUMN dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam tata kelola pemerintahan. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, sehingga mendukung terciptanya tata kelola yang lebih responsif dan berkualitas.

Adapun capaian realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam beberapa tahun adalah sebagai berikut:

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target PK	2024 Realisasi
77,69	78,92	79,77	86,04	Memuaskan	Memuaskan

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan atas komitmen dan keseriusan Kementerian BUMN dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi standar kinerja internal, tetapi juga untuk memberikan hasil yang nyata dan berdampak positif bagi masyarakat. Konsistensi dalam peningkatan nilai indeks ini menunjukkan bahwa Kementerian BUMN telah berhasil mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan serta harapan publik.

3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	120%	120%

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD sesuai dengan kewenangannya melalui pembahasan bersama pihak terkait. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Dalam LHP tersebut juga akan mencantumkan opini atas pemeriksaan laporan keuangan yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemberian opini oleh BPK atas pemeriksaan atas kewajaran informasi diantaranya:

- 1) Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 2) Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*);
- 3) Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

- c. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- d. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Laporan Keuangan Kementerian BUMN telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2023 sesuai surat BPK RI Nomor: 53/S/IX/07/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Perbandingan realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2024 dengan target tahun 2024, realisasi 2023, realisasi 2022, realisasi 2021, realisasi 2020 dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target Renstra 2024
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementerian BUMN Tahun 2020-2024, Opini BPK atas Laporan Keuangan masih dapat dipertahankan dengan memperoleh predikat WTP. Dengan perolehan Opini WTP di tahun 2024 ini, Kementerian BUMN mampu mempertahankan opini WTP selama 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2007. Pencapaian predikat WTP tahun 2024 tentunya merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang efektif dari seluruh insan Kementerian BUMN. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya:

- a. Melakukan rekonsiliasi dan pencatatan BMN setiap periode pelaporan;
- b. Menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu;
- c. Melakukan kolaborasi antar unit kerja dalam monitoring pelaksanaan anggaran, evaluasi pengadaan barang/jasa, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) serta capaian realisasi output;
- d. Melakukan pembahasan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan melakukan pengawasan internal secara efektif.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN BA 041, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

- a. Pemutakhiran SOP Pengelolaan BMN terutama proses pencatatan BMN yang berasal dari pengadaan dan perolehan hibah;
- b. Lebih cermat dalam memantau penatausahaan BMN khususnya yang berasal dari Belanja Modal dan hibah serta pemutakhiran data BMN dan memedomani ketentuan pencatatan aset tetap;

Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2024

- Melakukan kajian terkait kebutuhan anggaran Kementerian BUMN agar lebih menggambarkan tupoksi dan tanggung jawab;
- Melakukan evaluasi dan monitoring dari pelaksanaan kegiatan/belanja yang dibebankan ke masing-masing BUMN;
- Meningkatkan kompetensi dalam proses pengadaan barang/jasa serta pengelolaan dan administrasi pertanggungjawaban keuangan.

Memperhatikan capaian opini WTP di tahun 2024 dan kompleksitas indikator penilaian atas laporan keuangan serta untuk mempertahankan predikat WTP di tahun-tahun berikutnya, Kementerian BUMN telah menyusun beberapa rencana aksi di tahun 2025, antara lain:

- Meningkatkan kompetensi pegawai secara menyeluruh khususnya dalam pengelolaan keuangan negara;
- Memastikan proses pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- Menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta menyampaikan tepat waktu;
- Menyelesaikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran sebelumnya dengan dokumen pengungkapan yang memadai, sekaligus sebagai *lesson learned* dalam pengelolaan keuangan kedepannya;
- Menyusun dan menyempurnakan Prosedur Operasi Standar (POS) Pengelolaan BMN Kementerian BUMN.



Tujuan II Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
4	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	50,00%	89,36%	120,00%*
5	Persentase penyelesaian Program Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP)	50,00%	50,00%	100,00%

Keterangan:

* : Apabila % capaian di atas 120%, maka akan terhitung 120%.

4. Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah BUMN berkategori minimal Sehat (A) dibagi dengan keseluruhan BUMN untuk tahun buku 2024.	77,10%	50,00%	89,36%	107,65%	120,00%*

Berdasarkan PER-2/MBU/03/2023, tingkat kesehatan BUMN dinilai menggunakan Peringkat (*rating*) yang didasarkan pada Pemeringkatan. Penilaian tingkat Kesehatan BUMN dilakukan oleh:

1. Perusahaan Pemeringkat nasional;
2. Perusahaan Pemeringkat internasional; atau
3. Perusahaan Pemeringkat nasional yang terafiliasi dengan Perusahaan Pemeringkat internasional.

Setelah selesai Audit Tahun Buku 2023, BUMN menyampaikan laporan *rating* yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat berdasarkan kinerja laporan keuangan audit konsolidasi Tahun Buku 2023. Dari Laporan yang dikumpulkan sepanjang 2024, sebanyak 46 dari 47 BUMN telah menyampaikan laporan *rating*, dengan rincian sebagai berikut:

1. 23 BUMN mendapat predikat "Sangat Sehat";
2. 19 BUMN mendapat predikat "Sehat";
3. 1 BUMN mendapat predikat "Kurang Sehat"; dan
4. 3 BUMN mendapat predikat "Tidak Sehat"

Dengan demikian, persentase BUMN yang mendapatkan kategori "Sangat Sehat" dan "Sehat" adalah sebanyak 89,36% (42 BUMN/47 BUMN x 100%). Adapun program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil tingkat kesehatan secara berkala.
- b. Melakukan koordinasi dengan Keasdepan Teknis dan BUMN terkait hasil pelaporan tingkat kesehatan.
- c. Monitoring perubahan metode penilaian kesehatan finansial BUMN melalui proses penilaian atau *rating* yang dilakukan oleh lembaga profesional.
- d. Pemberian penghargaan kepada BUMN yang memenuhi Tingkat Kesehatan minimal "Sehat" dalam pemberian *tantiem/insentif* kinerja sebagai salah satu komponen perhitungannya yang dilakukan oleh unit Keasdepan Manajemen SDM.

Walaupun secara pencapaian telah melebihi target, Kementerian BUMN senantiasa melakukan program penyehatan BUMN. Oleh karena itu, terhadap 4 (empat) BUMN yang memperoleh kategori "Kurang Sehat" dan "Tidak Sehat" akan dilakukan pengawasan bersama-sama dengan Keasdepan Teknis. Perbandingan realisasi rasio BUMN dengan tingkat kesehatan dalam kategori sehat adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target Renstra 2024
50,00%	83,00%	77,10%	76,60%	61,90%	69,00%	77,00%

5. Persentase Penyelesaian Program Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Persentase Penyelesaian Program Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP)	N.A	50,00%	50,00%	N.A	100,00%

IKU persentase penyelesaian program rencana penyehatan perusahaan mengukur sejauh mana program pemulihan atau restrukturisasi perusahaan telah berhasil diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Persentase ini dihitung berdasarkan progres realisasi terhadap rencana yang telah disusun, mencakup aspek-aspek seperti restrukturisasi keuangan, peningkatan efisiensi operasional, perbaikan tata kelola, serta implementasi strategi bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Selama tahun 2024, BUMN yang sedang melakukan proses restrukturisasi dengan menjalankan rencana penyehatannya sebagaimana dokumen RPP/RPK yang telah ditetapkan oleh pemegang saham, antara lain:

1. RPP PT Bio Farma (Persero)
2. RPP PT Waskita Karya (Persero) Tbk
3. RPP PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
4. RPP PT Rekayasa Industri
5. RPP PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
6. RPK PT Krakatau Steel (Persero)
7. RPK PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
8. RPK PT Asabri (Persero)

Secara agregasi, pencapaian realisasi rencana penyehatan dari 8 (delapan) perusahaan tersebut mencapai 50% sesuai dengan yang ditargetkan.

Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dilakukan dengan memanfaatkan jalur informai digital dalam penyampaian informasi restrukturisasi BUMN, baik melalui pemanfaatan media Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kementerian BUMN maupun media elektronik lainnya.

Monitoring terhadap progress pencapaian rencana penyehatan sebagaimana target tata waktu yang telah ditetapkan, dilakukan secara intens oleh masing-masing Keasdepan Teknis melalui media online sehingga dapat segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan. Disamping itu, melalui optimalisasi pembagian kerja tim analis di tingkat jabatan fungsional PKPN yang terstruktur melalui pembagian penanggung jawab portofolio setiap BUMN, meningkatkan efektivitas dalam pengawasan terhadap realisasi pencapaian progress RPP.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2024

Kementerian BUMN, melalui Keasdepan Manajemen Risiko dan Kepatuhan, telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor ND-51/DKU.MBU.B/08/2024 yang ditujukan kepada Keasdepan teknis. Nota Dinas ini berisi permintaan data terkait perkembangan penyusunan dan implementasi RPP, guna memastikan pemantauan yang efektif serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam proses tersebut.

Kementerian BUMN, melalui Keasdepan Teknis dan tim PMO Penyehatan BUMN, telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis komprehensif untuk mengidentifikasi faktor utama yang dapat meningkatkan percepatan pencapaian target.
2. Melaksanakan pemantauan berkala guna meninjau perkembangan serta mengatasi tantangan yang muncul.
3. Menjamin kelancaran komunikasi yang sistematis dan berkelanjutan di antara tim terkait.

Sementara itu, pada tahun 2025 terdapat beberapa hal yang akan dilakukan yaitu:

1. Penguatan analisa progres pencapaian dari masing-masing rencana kerja dalam RPP yang telah ditetapkan oleh RUPS, sehingga poin concern dapat segera ditindaklanjuti oleh BUMN.
2. Penguatan analisa terhadap kecukupan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh masing-masing BUMN dalam mencapai target penyelesaian sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
3. Penyelesaian isu-isu utama yang ditemukan selama pelaksanaan program kerja RPP berdasarkan bukti dokumentasi yang dikirimkan oleh Keasdepan Teknis.

Sasaran Strategis 4 : Penguatan Kapasitas BUMN

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
6	Nilai PMN Non Tunai yang berasal dari Konversi Utang Pemerintah	Rp0,65 Triliun	Rp0,65 Triliun	100,00%

6. Nilai PMN Non Tunai yang berasal dari Konversi Utang Pemerintah

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
PMN Non Tunai PT LEN	N.A	Rp0,65 Triliun	Rp0,65 Triliun	N.A	100,00%

Pada Renstra Kementerian BUMN Tahun 2020-2024, indikator pencapaian setiap tahunnya adalah dengan menghitung persentase utang RDI/SLA/Eks BPPN dan utang tidak produktif dari BUMN yang kurang sehat yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total saldo yang perlu diselesaikan. Sedangkan setiap tahunnya tidak dilakukan pengusulan konversi secara rutin. Mempertimbangkan hal tersebut, maka dilakukan perubahan indikator pencapaian, yaitu Total restrukturisasi utang Eks BPPN dan utang tidak produktif BUMN yang berhasil diselesaikan.

Pada tahun 2024, terdapat konversi utang Eks BPPN menjadi PMN pada PT Len Industri (Persero) sebagaimana tercantum dalam UU APBN 2024 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mempertimbangkan hal ini, nama IKU pada Renstra yang sebelumnya Nilai Restrukturisasi BUMN disesuaikan menjadi Nilai PMN Non Tunai yang berasal dari Konversi Utang ke Pemerintah.

Adanya utang dana talangan eks BPPN sebagai bentuk dukungan Pemerintah terhadap program Restrukturisasi Sumber Daya Manusia PT Dirgantara Indonesia melalui pengurangan jumlah pegawai yang tidak produktif. Hal ini dikarenakan terhentinya *major project* Pesawat Terbang N250 dan N130 akibat krisis moneter. Dana Eks BPPN tersebut digunakan untuk membayar pesangon dan gaji karyawan.

Dengan terbentuknya Holding BUMN Industri Pertahanan/"Defend ID", maka piutang negara Eks BPPN tersebut dinovasikan kepada PT Len Industri (Persero) selaku induk holding. Piutang negara Eks BPPN tersebut dapat diselesaikan melalui konversi utang Pemerintah menjadi PMN Non Tunai TA 2024 sebesar Rp649.229.893.9000,48 melalui penerbitan PP No. 54 Tahun 2024. PMN Non Tunai tersebut diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan, rasio keuangan terutama dari sisi *Debt to Equity* (DER), Likuiditas, dan Solvabilitas.

Beberapa hal yang telah dilakukan selama 2024 yaitu:

1. Pembahasan Antar Kementerian (PAK) pada 5 Agustus 2024.
2. Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pada 27 September 2024.
3. Penerbitan PP No. 54 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara kepada PT Len Industri (Persero).

Adapun pada tahun 2025 hal-hal yang akan dilakukan yaitu:

1. Senantiasa memantau dan mengawal setiap proses, dan berkoordinasi aktif dengan pemangku kepentingan terkait untuk setiap rencana aksi Perusahaan.
2. Monitoring dan evaluasi dampak PMN TA 2024 sesuai KPI dalam kajian bersama yang telah disepakati.



Tujuan III

Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN

Sasaran Strategis 5 :Meningkatnya Daya Saing BUMN

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
7.	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	54 Negara	101 Negara	120,00*

7. Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Negara Tujuan Ekspor minimal USD10.000	98	54	101	103,06	120,00*

Keterangan:

* : Apabila % capaian di atas 120%, maka akan dihitung 120%.

BUMN *Go Global* dimulai sejak 17 Juli 2020 melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri. Strategi ini merupakan pengembangan dari peningkatan nilai dan penguatan *value chain* yang merupakan perluasan nilai dari Lima Prioritas BUMN.

BUMN *Go Global* memiliki tujuan untuk memperkenalkan produk BUMN agar diserap oleh pasar *global*, menyatukan kekuatan BUMN di luar negeri sehingga menciptakan efisiensi operasional dan memperbaiki *supply chain* dengan melakukan investasi atau akuisisi perusahaan di luar negeri. Sasaran strategisnya adalah peningkatan daya saing BUMN melalui indikator kinerja berupa peningkatan pasar BUMN ke Luar Negeri diukur berdasar jumlah negara tujuan ekspor.

Berikut merupakan perbandingan jumlah negara ekspor dengan nilai >\$10.000 dari tahun 2021-2024:

No	Tahun	Jumlah Negara Tujuan
1	2021	127
2	2022	107
3	2023	98
4	2024	101

Pada tahun 2024, jumlah negara tujuan ekspor BUMN adalah sebanyak 101 negara, melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 54 negara dan meningkat dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat pengurangan 19 negara ekspor namun terjadi penambahan 22 negara ekspor, sehingga pada 2024 terjadi peningkatan 3 negara ekspor dibandingkan tahun 2023 (detail negara sebagaimana Lampiran B). Berdasarkan ringkasan data di atas, negara tujuan ekspor BUMN berasal dari negara lintas benua, yaitu Asia, Amerika, Australia, Afrika dan Eropa. Dari sisi sektor aktivitas ekspor BUMN juga tergolong beragam yaitu minerba, energi minyak dan gas, kesehatan, manufaktur, pertahanan, konstruksi, perkebunan serta pangan dan pupuk.

Terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pencapaian peningkatan pasar BUMN ke Luar Negeri dalam rangka peningkatan daya saing BUMN dan strategi BUMN *Go Global* terdiri dari:

- Persaingan harga yang ketat di pasar internasional termasuk adanya penurunan harga pasar, mendorong BUMN untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi agar tetap memiliki daya saing.
- Kondisi *partner/mitra* di negara tujuan yaitu kesulitan mendapatkan *partner* lokal yang *bonafide* dan terpercaya.

- c. Kualitas, spesifikasi, dan sertifikasi produk serta *manufacturing* yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar internasional.
- d. Pengaruh kondisi politik luar negeri yang tidak stabil dan ekonomi yang kurang baik pada beberapa negara berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek dan realisasi ekspor.
- e. Perubahan kebijakan dan regulasi di negara tujuan ekspor seperti terjadi penundaan pengadaan atau adanya kebijakan lingkungan tertentu.
- f. Terbatasnya akses pendanaan untuk ekspansi *global*.
- g. Perlambatan penerbitan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada komoditas mineral yang menghambat laju produksi dan ekspor komoditas mineral.

Dalam pencapaian peningkatan pasar BUMN ke Luar Negeri telah dilakukan langkah-langkah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain:

- a. Keikutsertaan BUMN dalam lelang yang diselenggarakan oleh organisasi internasional (antara lain klaster Industri Kesehatan pada kegiatan UNICEF dan PAHO) dan negara kerja sama bilateral, serta berpartisipasi dalam kegiatan pameran dagang internasional.
- b. Mengikuti pertemuan bisnis bilateral/multilateral yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dan/atau Kementerian Teknis untuk membangun jaringan kerja sama internasional.
- c. Diversifikasi produk dan ekspansi pasar.
- d. Melakukan evaluasi harga jual produk.
- e. Senantiasa mencari *potential buyer*.

Dalam rangka mendukung BUMN *Go Global* dan meningkatkan potensi pasar BUMN ke Luar Negeri, Kementerian BUMN akan terus melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan kepada BUMN untuk terus berupaya untuk meningkatkan daya saingnya melalui beberapa hal diantaranya:
 - Meningkatkan kompetensi dan *strategic partnership* internasional.
 - Peningkatan *channeling stakeholder* baik melalui *workshop*, seminar, FGD, dan menghadiri berbagai pameran/pameran di luar negeri untuk perolehan mitra kerja sama.
 - Menerapkan strategi *customer retention* dan *contractual* untuk beberapa destinasi tujuan ekspor guna memastikan hubungan bisnis yang berkelanjutan dan menghindari risiko kehilangan pelanggan kepada pesaing.
 - Menerapkan strategi harga yang bersaing.
 - Melakukan kegiatan kunjungan rekanan secara aktif.
 - Memperbaiki sistem kerja internal perusahaan guna meningkatkan produktivitas.
- b. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait yang dapat mendukung peningkatan daya saing BUMN ke luar negeri.

Sasaran Strategis 6: BUMN Unggul di Kancah Global

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
8	Jumlah BUMN yang masuk peringkat Global	5 BUMN	5 BUMN	100,00%
9	Pembentukan <i>Holding</i> BUMN	1 Holding	1 Holding	100,00%

8. Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah BUMN yang masuk Peringkat Dunia seperti Global Fortune 500 dan Forbes 2000	6	5	5	83,33%	100,00%

BUMN yang masuk peringkat global seperti *Forbes Global 2000* dan *Fortune Global 500* menjadi pencapaian Indikator Kinerja ini. *Forbes Global 2000*, diterbitkan oleh majalah *Forbes*, melakukan pemeringkatan 2000 perusahaan publik dunia dengan melihat 4 (empat) aspek yaitu *sales*, *profit*, *assets*, dan *market value*. *Fortune Global 500* merupakan sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh majalah *Fortune* yang memeringkatkan 500 perusahaan umum dan milik pemerintah teratas, diperingkatkan berdasarkan total pendapatan yang tertuang di dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun fiskal sebelumnya.

Realisasi Indikator Kinerja diperoleh dengan mencatat jumlah BUMN yang terdapat dalam daftar *Forbes Global 2000* pada website *Forbes* dan *Fortune Global 500* pada website *Global 500 | Fortune*. Pada tahun 2024, terdapat 9 perusahaan Indonesia yang masuk peringkat *Forbes Global 2000* yaitu:

1. **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – peringkat 308**
2. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – peringkat 373**
3. PT Bank Central Asia Tbk – peringkat 457
4. **PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk – peringkat 912**
5. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – peringkat 944**
6. PT Bayan Resources Tbk – peringkat 1.194
7. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk – peringkat 1.591
8. PT Amman Mineral Internasional Tbk – peringkat 1.605
9. PT Adaro Energy Indonesia Tbk – peringkat 1.738

Dari 9 perusahaan Indonesia tersebut, 4 diantaranya merupakan perusahaan BUMN dan menempati peringkat di bawah 1.000 atau peringkat 5 perusahaan Indonesia teratas.

Pada *Fortune Global 500* tahun 2024, hanya terdapat 1 perusahaan Indonesia yang memasuki daftar dengan **peringkat 165** yaitu **PT Pertamina (Persero)**, yang juga merupakan perusahaan BUMN.

Adapun perbandingan realisasi selama 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut:

Kategori	BUMN	Peringkat			
		2021	2022	2023	2024
<i>Forbes Global 2000</i>	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	362	349	308	308
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	507	489	418	373
	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	762	745	788	912
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.742	1.153	931	944
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-	-	1.572	-
<i>Fortune Global 500</i>	PT Pertamina (Persero)	287	223	141	165

Pencapaian kinerja dapat diraih karena senantiasa melakukan transformasi kinerja yang secara konsisten menunjukkan tren positif sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperbaiki kinerja usaha yang dilakukan secara berkelanjutan dengan manajemen risiko yang terukur.

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2024, diantaranya yaitu:

1. Bagi BUMN klaster Jasa Keuangan, adanya ketidakpastian ekonomi global akibat dinamika suku bunga The Fed yang masih fluktuatif sehingga memengaruhi stabilitas pasar keuangan dan meningkatkan *cost of fund* bagi perbankan, serta dampak penyesuaian kebijakan restrukturisasi pasca pandemi.
2. Stabilitas kondisi geopolitik yang berpengaruh terhadap beberapa hal, termasuk ekonomi global.

Dalam menghadapi tantangan di tahun 2024, utamanya BUMN klaster Jasa Keuangan senantiasa memperkuat strategi transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas akses layanan keuangan. Selain itu, optimalisasi ekosistem bisnis dengan pendekatan berbasis data dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta memperkuat permodalan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kedepannya, hal-hal yang akan dilakukan Kementerian BUMN untuk mendukung BUMN di kancah global:

1. Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mendorong BUMN dalam menciptakan nilai, baik dari aspek ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Indonesia.
2. Memberikan arahan strategis kepada BUMN untuk terus melanjutkan transformasinya dalam memperkuat ekosistem layanan serta strategi yang akan ditempuh dengan mendorong efisiensi untuk memperkuat jaringan bisnis serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mendorong BUMN untuk terus memperbaiki tata kelola, digitalisasi layanan, dan penguatan kapabilitas SDM guna memastikan pertumbuhan bisnis yang lebih kuat, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

9. Pembentukan *Holding* BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah <i>Holding</i> yang terbentuk	4 <i>Holding</i>	1 <i>Holding</i>	1 <i>Holding</i>	25,00%	100,00%

IKU Pembentukan *Holding* BUMN mencakup persentase penyelesaian perizinan dan regulasi, harmonisasi struktur organisasi dan tata kelola, serta integrasi sistem operasional dan keuangan agar selaras dengan standar yang ditetapkan sehingga terbentuk 1 sinergi BUMN untuk meningkatkan daya saing dan nilai Perusahaan. Pembentukan *holding* dilakukan dengan penerbitan PP *Holding*.

Dalam pembentukan *holding*, terdapat kompleksitas regulasi, perbedaan kepentingan antar entitas, serta tantangan dalam integrasi sistem dan operasional. Dalam hal ini, efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan melalui koordinasi yang lebih efektif, digitalisasi proses administrasi, serta penyesuaian strategi implementasi agar lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis dan kebijakan pemerintah.

Kementerian BUMN telah melakukan beberapa kegiatan dalam proses pembentukan *Holding* di Injourney Grup melalui integrasi BUMN Bandara melalui Surat Menteri BUMN Nomor: S-431/MBU/09/2024 tanggal 5 September 2024. Penataan terhadap Subholding Bandara dan *Subholding Airport Services* di bawah *Holding* Pariwisata dan Pendukung bertujuan:

- Meningkatkan profitabilitas melalui peningkatan sinergi pada dimensi komersial dan operasional.
- Menjadikan BUMN Bandara sebagai operator bandara berskala dunia (#5 terbesar di dunia) sehingga meningkatkan peluang kemitraan berbasis global yang dapat mendatangkan *foreign direct investment*.
- Menciptakan kolaborasi dalam ekosistem aviasi antara operator bandara, maskapai penerbangan, penyedia layanan dan sektor pariwisata.
- Meningkatkan konektivitas domestik dan internasional serta meningkatkan jangkauan dan kecepatan logistik udara.

Selain itu, dalam kegiatan *Holding* Danareksa Tahap II, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Surat Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN Nomor S-54/MBU/DHK/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 hal Penyampaian Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara RI pada PT Danareksa (Persero);
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-230/MBU/04/2024 tanggal 19 April 2024 hal Pembentukan National Asset Management Company (NAMCO);
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-382/MK.6/2024 tanggal 3 Mei 2024 hal Tanggapan atas Pembentukan National Asset Management Company (NAMCO);
- Surat dari Direktur Kekayaan Negara dipisahkan No. S-91/KN.3/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang : Rencana Penambahan Penyertaan Modal Negara kepada PT Danareksa (Persero) Yang Berasal dari Inbreng Saham Negara pada PT Produksi Film Negara.

Perbandingan realisasi jumlah pembentukan holding BUMN sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target Renstra 2024
1	1	2	4	5	1	2

Pada Tahun 2025, Kementerian BUMN akan melakukan peningkatan efisiensi koordinasi di antara lingkungan Kementerian BUMN, Kementerian/Lembaga terkait, dan BUMN yang akan menjadi bagian holding, sekaligus mengoptimalkan proses pembahasan atau pemahaman mendalam mengenai materi penelitian terkait holding. Hal ini mencakup kegiatan seperti diskusi kelompok terfokus (FGD) dan bekerja sama dengan konsultan untuk membantu merumuskan rencana pembentukan Holding BUMN.

Tujuan IV

Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Daya Saing BUMN

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
10)	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPNP)	Rp630,63 triliun	Rp684,87 triliun	108,60%

10. Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPNP)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Kontribusi BUMN kepada Negara	Rp548 Triliun	Rp630,63 Triliun	Rp684,87 Triliun	124,98%	108,60%

BUMN diharapkan dapat memberikan wujud nyata kontribusi dalam perekonomian nasional dalam bentuk fiskal atau kontribusi terhadap APBN yang berasal dari tiga sumber yaitu:

- Pembayaran pajak;
- Pembagian dividen yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemegang saham; dan
- PNBP lainnya.

Kontribusi BUMN kepada Negara dalam bentuk Dividen, Pajak, dan PNBPNP lainnya untuk tahun 2024 (*Unaudited*) menyumbang sebesar Rp684,87 T atau tercapai 108,6% dari target (Rp630,63 T) yang terdiri dari kontribusi Pajak sebesar Rp491,66 T, Dividen sebesar Rp85,56 T, dan PNBPNP Non Dividen Lainnya sebesar Rp107,65 T. Total kontribusi fiskal BUMN sebesar Rp684,87 T meningkat 10,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai tersebut juga merepresentasikan 24,4% dari target Penerimaan APBN 2024. Capaian ini utamanya didorong oleh adanya kondisi perekonomian Indonesia yang perlahan mulai stabil dan pulih setelah kondisi Covid-19, diiringi dengan perbaikan margin, penguatan struktur kapitalisasi BUMN, serta adanya langkah perbaikan portofolio melalui restrukturisasi korporasi.

Perkembangan realisasi kontribusi BUMN dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian (Rp T)	2021	2022	2023	2024*
Dividen	30	40	81	86
Pajak	278	410	457	492
PNBP Lainnya	87	98	84	108
Total	395	548	622	685

*) Data Unaudited per 3 Februari 2025

Langkah-langkah efektif yang telah dilakukan sepanjang 2024 dalam mendorong pencapaian target yaitu:

- Menyusun kebijakan dividen BUMN dengan mempertimbangkan kinerja dan kemampuan BUMN.
- Melakukan *monitoring* realisasi dividen dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna memperbarui data setoran dividen.
- Melakukan *monitoring* realisasi kontribusi Pajak, Dividen, dan PNBPN Lainnya setiap triwulan.
- Mendorong BUMN agar melaporkan realisasi kontribusi setiap triwulan pada *platform* Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN secara tepat waktu.

Hal-hal yang perlu dilakukan di tahun berikutnya antara lain:

- Meninjau kebijakan dividen BUMN dan memperbaruinya, terutama kaitannya dengan adanya UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Melakukan monitoring realisasi dividen dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna memperbarui data setoran dividen.
- Melakukan monitoring realisasi kontribusi Pajak, Dividen, dan PNBPN Lainnya setiap triwulan.
- Mendorong BUMN agar melaporkan realisasi kontribusi setiap triwulan pada platform Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN secara tepat waktu

Sasaran Strategis 8: Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
11	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp318,61 Triliun	Rp327,70 Triliun	102,85%
12	Persentase penyelesaian tahapan progress PSN untuk tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN	88%	80,11%	91,03%
13	Persentase penyelesaian tahapan progress Proyek SDU untuk tahun 2023 di luar PSN	100%	87,90%	87,90%
14	Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep <i>Creating Shared Value</i> (CSV)	90%	90%	100,00%
15	Jumlah UMKM Mitra Binaan yang naik kelas	5750	8449	120,00%*)

*) capaian maksimal 120%

11. Realisasi Belanja Modal (CAPEX – Capital Expenditure)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Realisasi Belanja Modal	327,13	318,61	327,7	100,17%	102,85%

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), *Capital Expenditure* (Capex) adalah pengeluaran yang biasanya berupa penambahan kemampuan maupun kualitas terhadap aktiva tetap yang sudah ada, dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi, kapasitas produksi, ataupun umur ekonomis dari aset tetap. Biasanya pembiayaan jenis ini besar dari sisi jumlah nominalnya dan bukan merupakan kejadian yang sering terjadi. Pembiayaan jenis ini akan mempengaruhi kegiatan operasi perusahaan di masa mendatang, sehingga pembiayaan ini akan menambah nilai dari aset tetap.

Capex menjadi aspek penting dalam strategi keuangan BUMN. Hal ini mencerminkan investasi perusahaan yang diperlukan untuk memperoleh, memperbaiki, ataupun memelihara aset fisik dan non fisik yang krusial bagi operasional bisnis. Dengan capex yang tepat, BUMN dapat meningkatkan efisiensi operasional, baik dengan memperbarui teknologi, meningkatkan kapasitas produksi, atau mematuhi regulasi pemerintah. Selain itu, Capex juga mendukung pertumbuhan bisnis dengan memungkinkan perluasan fasilitas atau investasi dalam aset yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi BUMN.

Realisasi Capex BUMN tahun 2024 senilai Rp327,7 T atau tercapai 102,85% dari target 2024. Capex terbesar tahun 2024 masih didominasi oleh BUMN Klaster Energi, Minyak, dan Gas yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Dalam pencapaian realisasi Capex 2024, Kementerian BUMN telah mendorong BUMN untuk melaksanakan proyek-proyek investasi dan pengembangan. Untuk memaksimalkan proyek tersebut, program-program yang dilakukan antara lain:

- a. *Strengthen Core*, yakni investasi yang dilakukan pada kegiatan yang mendukung bisnis utama perusahaan, namun tidak terbatas pada eksplorasi dan pengembangan bisnis.
- b. *New Green Business*, yakni investasi yang dilakukan dalam rangka mendukung penerapan ESG dalam upaya kinerja yang berkelanjutan sehingga operasional bisnis BUMN dapat mengutamakan keseimbangan lingkungan, keseimbangan sosial, dan tetap memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik.

Capex (Rp T)	2021	2022	2023	2024*
Infrastruktur	278,6	219,1	207,97	231,1
Non Infrastruktur	38,7	39,6	84,4	96,6
Total	317,3	258,7	292,4	327,7

*) Data Unaudited per 3 Februari 2025

Langkah-langkah efektif yang telah dilakukan sepanjang 2024 dalam mendorong pencapaian target yaitu:

- a. Perbaikan proses perencanaan atas pengusulan capex dengan mempertimbangkan urgensi, prioritas, dan kemampuan keuangan BUMN.
- b. Melakukan evaluasi atas efektivitas investasi selama tahun berjalan dan kemanfaatan dukungan pada kontribusi pendapatan.
- c. Memberikan arahan terhadap optimalisasi Capex melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- d. Mendorong BUMN untuk melaksanakan program strategis termasuk program yang berkaitan dengan realisasi Capex untuk dilaksanakan sesuai *timeline* yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2024

- e. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan capex dengan memilih vendor yang kompetitif.
- f. Mendorong BUMN melaporkan realisasi Capex secara triwulanan secara tepat waktu pada Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN.

12. Presentase penyelesaian tahapan progres PSN untuk Tahun 2024 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024*)	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
% Realisasi Penyelesaian tahapan progres PSN/ Target Penyelesaian Proyek PSN	91,88%	88%	80,11%	87,19%	91,03%

PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

BUMN berperan penting dalam memberikan dukungan terhadap Pemerintah dalam pembangunan proyek PSN sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

Adapun proyek-proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional itu antara lain, proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, proyek jalan nasional atau strategis nasional non-tol, proyek sarana dan prasarana kereta api antarkota, proyek kereta api dalam kota, proyek revitalisasi bandara, pembangunan bandara baru, proyek pembangunan bandara strategis lain, pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas, pembangunan kilang minyak, proyek pipa gas atau terminal LPG, dan lain-lain.

Perhitungan target IKU Persentase penyelesaian tahapan Progress PSN untuk Tahun 2024 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN adalah dengan membandingkan rata-rata progress PSN Tahun 2024 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN dengan target penyelesaian yaitu 88%. Ketidaktercapaian pekerjaan pada beberapa proyek disebabkan karena beberapa hal, seperti keterlambatan pembebasan lahan pada pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA, Jalan Tol Kediri – Kertosono, Jalan Tol Serang – Panimbang, dan Jalan Tol Betung – Jambi. Pada pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan, ketidaktercapaian progres disebabkan karena adanya keterlambatan akibat kinerja kontraktor pada Paket 3 (Sadang-Bojongmangu) yang kurang optimal akibat kendala finansial sehingga pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain. Pada pembangunan Jalan Tol Akses Patimban terdapat kendala dalam proses tender yang berimbas pada penundaan jadwal konstruksi. Selain itu terdapat adanya permasalahan teknis pekerjaan pada pembangunan Bendungan Manikin, Bendungan Way Apu, PLTU Palu, Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi.

Realisasi Persentase penyelesaian tahapan progres PSN untuk Tahun 2024 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN sebesar 91,03%. Adapun rekapitulasi detail progres PSN untuk Tahun 2024 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN tersaji dalam lampiran.

Adapun *Highlight* beberapa progres PSN Tahun 2024 di seluruh kluster BUMN yang telah tercapai 100% adalah sebagai berikut:

- a. Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit.
- b. Pekerjaan Infrastruktur Dasar Kawasan Industri meliputi Jalan Akses, Air Bersih, Listrik pada Kawasan Industri Kuala Tanjung.
- c. Pengembangan Pelabuhan Sorong dan Arar.
- d. Kilang Minyak Tuban (Ekspansi).
- e. *Upgrading* Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan.
- f. *Green Refinery* Cilacap.
- g. Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG – Bima
- h. Beberapa program PLTA, PLTU, PLTMG, PLTM, PLTS, SKTT, SUTT, SUTET, GIS, GI, dan GITET
- i. Program Pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera (P3FH)
- j. Proyek Pembangunan *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR)
- k. Proyek Pembangunan *Smelter Slime Anode & Precious Metal Refinery*
- l. Proyek Pengembangan Ekosistem EV Battery

Dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, Pemerintah memiliki Pilar Pemerataan Pembangunan melalui Pembangunan infrastruktur yang masif dan terintegrasi. Infrastruktur yang diperlukan salah satunya infrastruktur energi. Selain itu, dengan dibangunnya infrastruktur energi yang memadai sebagai upaya mewujudkan kedaulatan energi dalam negeri. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi, Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN di bawah Asdep Emigas melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Beberapa proyek strategis di masing-masing BUMN dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Realisasi proyek Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) telah mencapai 100%, ditandai dengan selesainya proses pengadaan lahan seluas 221,17 hektar untuk keperluan relokasi Jalan Kabupaten dan SUTT.
- b. RDMP Balikpapan, teralisasi sebesar 98,98% dengan penyelesaian OA *Revamp* telah tercapai 100% yang telah dilaksanakan pada 11 September 2024, serta MC RFCC tercapai sebesar 97,96%. Ketidaktercapaian ini dikarenakan adanya *financial difficulties* yang dialami Kontraktor akibat belum adanya kesepakatan klaim *Change Order*.
- c. RDMP Balongan, terealisasi sebesar 100%, dengan telah diselesaikannya *Change Order* (CO) atas ruang lingkup pekerjaan *utilities*, *heat exchanger* dan pergeseran *pit stop*, serta *performance test* dan sertifikat *Operational Acceptance* (OA) telah selesai dilaksanakan pada 5 April 2024.
- d. *Green Refinery* Cilacap, terealisasi sebesar 100% dengan telah dikeluarkannya Keputusan Pre-ID dari Dewan Komisaris telah disampaikan melalui surat Dewan Komisaris PT Kilang Pertamina Internasional Nomor R-001/K/DK-KPI/2024 tanggal 25 Januari 2024, yaitu untuk saat ini tidak menyetujui pelaksanaan Pre-ID Proyek *Green Refinery Cilacap Phase-2* dengan pertimbangan keterbatasan ekuitas karena bersamaan masih harus membangun 2 unit *Diesel Hydrotreater* (DHT) dan 2 unit *Gasoline Hydrotreater* (GSH) yang sifatnya *mandatory*. Sehingga *milestone* dianggap selesai.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2024

- e. Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM – Maumere, terealisasi sebesar 92,86%, saat ini proses konstruksi masih berjalan dengan adanya kendala finansial kontraktor.
- f. Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG – Kupang, terealisasi sebesar 92,06% dimana saat ini masih berjalan dengan adanya kendala finansial kontraktor.
- g. Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG – Bima, terealisasi sebesar 100% dengan telah selesai dilakukannya *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) dan *commissioning*.
- h. Pembangunan Jaringan Gas Kota – Jargas Mandiri, terealisasi sebesar 30,33% dengan progres jaringan gas yang telah terpasang sebesar 35.487 SR, gas-in sebesar 18.171 SRT, dan pipa terpasang kumulatif sepanjang 2.029 km.
- i. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan capaian secara keseluruhan sebesar 99,35% meliputi capaian pembangkit yang telah COD sebanyak 8 Pembangkit dari 10 Pembangkit yang menjadi target IKU Tahun 2024 dengan capaian 99,56%. Proyek Transmisi tercapai 98,68% dengan Transmisi yang telah COD/RLB/SLO sebanyak 12 transmisi dari 13 Transmisi yang menjadi target IKU Tahun 2024. Kemudian, Proyek Gardu Induk tercapai 100% dengan Gardu Induk yang telah COD/RLB/SLO sebanyak 12 Gardu Induk.
- j. Program pembangunan Pabrik Feronikel Haltim Proyek Pembangunan Feronikel Haltim merupakan program strategis nasional untuk mendukung hilirisasi industri nikel yang dilaksanakan oleh PT ANTAM Tbk. Pabrik Feronikel Haltim memiliki kapasitas sebesar 13.500 TNi/annum dengan biaya investasi Rp4 Triliun.
- k. Proyek pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) yang merupakan proyek hilirisasi bauksit menjadi alumina dengan realisasi *milestone* sebesar 100% ytd pada Desember 2024.
- l. Proyek Kawasan Industri Pupuk di Fakfak tercapai 95% yang terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu penyelesaian laporan studi Cavity (30%), pengadaan jasa konsultan (20%), dan finalisasi FS Kawasan (45%).
- m. Penyelesaian tahapan progres PSN mengenai pengelolaan KEK Merauke yang hanya tercapai 60% mengingat kelanjutan realisasi proyek masih menunggu pembahasan lebih lanjut dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu pemrakarsa proyek KEK Kehutanan, Pangan, dan Energi Merauke.
- n. Proyek *unlock value BSI* terealisasi 100% yang mana proyek ini merupakan dorongan pemerintah atas pertumbuhan industri keuangan syariah melalui PT Bank Syariah Indonesia Tbk. agar memiliki daya saing global dengan nilai perusahaan yang tinggi. Pada awal tahun 2024 lalu, BSI telah melaksanakan NDR sebagai bentuk penyampaian *update* kinerja keuangan dan strateginya kepada investor asing ke berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Serikat serta mendapatkan tanggapan yang cukup positif mengenai kinerja BSI.

Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 untuk pencapaian progres PSN Tahun 2024 di seluruh klaster BUMN Binaan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan *monitoring* taktis melalui *site visit* pada proyek Pembangunan Proyek PSN yang dibangun oleh BUMN Binaan Kementerian BUMN secara berkala.
- b. Melakukan *monitoring* dengan BUMN terkait secara berkala untuk membahas kendala teknis, isu pendanaan dan hal lain yang bersifat strategis untuk mendukung penyelesaian Proyek PSN oleh BUMN Binaan Kementerian BUMN sesuai dengan tata kelola yang baik.
- c. Kementerian BUMN telah melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain/lintas sektoral untuk membahas isu strategis dalam penyelesaian pembangunan PSN yang dibangun oleh BUMN Binaan Kementerian BUMN.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2024

Program kerja yang direncanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Monitoring* secara berkala untuk akselerasi penyelesaian pembangunan proyek PSN yang akan diselesaikan pada tahun 2025.
- Kementerian BUMN akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain untuk membahas penyelesaian progres PSN pada tahun 2025.
- Monitoring* kinerja keuangan dan operasional BUMN tetap terjaga dengan baik dalam melaksanakan penugasan dari Pemerintah untuk pembangunan proyek PSN.
- Kementerian BUMN akan mendorong BUMN untuk tetap mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

13. Presentase penyelesaian tahapan Progress SDU untuk tahun 2024 di luar PSN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
% Realisasi Penyelesaian tahapan progres Proyek SDU/ Target Penyelesaian Proyek SDU di luar PSN	91,15%	100%	87,90%	96,43%	87,90%

Strategic Delivery Unit (SDU) merupakan unit yang dibentuk oleh Menteri BUMN dalam rangka mengawal dan mendorong percepatan penyelesaian proyek yang menjadi prioritas dan bersifat strategis pada BUMN. Memperhatikan sifat strategis dari proyek SDU tersebut, maka Persentase Penyelesaian tahapan Progres Proyek SDU Tahun 2024 turut dimuat pada Perjanjian Kementerian BUMN Tahun 2024 untuk memastikan monitoring secara berkala proyek tersebut berjalan dengan baik.

Dengan memperhatikan terdapat Proyek SDU yang turut melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2024, maka proyek yang termasuk dalam PSN kemudian dikeluarkan dari penghitungan atas IKU ini untuk kemudian dimasukkan dalam IKU "Persentase Progress penyelesaian PSN".

Penghitungan target atas IKU ini diperoleh dengan membandingkan antara persentase rata-rata progress SDU (non-PSN) yang terealisasi dengan target persentase penyelesaiannya yaitu 100%. Adapun penghitungan persentase progress penyelesaian proyek SDU tersebut dengan cara merinci langkah/tahap yang telah diselesaikan, kemudian dilakukan proporsi persentase progress.

Rincian capaian penyelesaian Proyek SDU non PSN tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Proyek SDU	% Penyelesaian
1	<i>Unlock Value</i> PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	100%
2	<i>Unlock Value</i> IHC	82,5%
3	Pengembangan bisnis Petrokimia Group TPPI	100%
4	Peningkatan Produksi dan <i>Reserve</i> Hulu	104%
5	Pengembangan Bioethanol – <i>Groundbreaking</i> proyek <i>Ethanol Plant</i> Pertamina – PTPN	78%
6	Implementasi subsidi tepat sasaran	100%
7	Pengembangan Geothermal	88,5%
8	Program CCS/CCUS	100%
9	<i>Energy Transition Roadmap</i> (Green RUPTL)	100%
10	<i>Indonesia Energy Transition Country Platform</i>	33%
11	<i>EV Ecosystem Initiative</i>	100%
12	<i>Bali International Hospital</i> (BIH) Sanur	90%
13	KEK Sanur : Operasional Kawasan Ekonomi Khusus, Operasional Lot H1 dan H2, Pembangunan Klinik Lot H3, Lot H5, dan Lot H6	96%
14	KEK Mandalika : Pembangunan kantor pabean khusus dan operasional <i>ocean view</i> (Hotel Montana dan <i>Shopping Arcade</i>)	68%
Rata-Rata		87,90%

Realisasi persentase rata-rata progres penyelesaian proyek SDU Tahun 2024 tercapai sebesar 87,90% atau lebih rendah dari yang ditargetkan, yaitu 100%.

Selaras dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN melaksanakan proyek dan program strategis sejalan dengan bisnis BUMN masing-masing. Dalam pelaksanaan proyek dan program strategis tersebut, Menteri BUMN selaku Pembina BUMN merumuskan kebijakan dan/atau melaksanakan kebijakan terkait dengan BUMN. Selanjutnya, Menteri BUMN merumuskan proyek-proyek strategis yang dijalankan oleh BUMN di luar PSN. Proyek-proyek strategis tersebut dituangkan ke dalam *Strategic Delivery Unit* (SDU). Proyek yang masuk dalam daftar SDU sendiri merupakan proyek-proyek yang bersifat strategis yang memiliki dampak signifikan secara sosial maupun ekonomi bagi BUMN yang tetap sesuai dengan aturan yang berlaku yang kemudian menjadi *concern* Menteri yang terus dilakukan pemantauan atas progres proyek hingga tercapai target-targetnya

Adapun Proyek SDU yang dijalankan oleh BUMN pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. IHC *Unlock Value* terealisasi sebesar 82,25%, dengan penyelesaian *second drawdown completion partner* terealisasi sebesar 80% dan operasional RS Bali Internasional sebesar 85%. Ketidaktercapaian ini dikarenakan terdapat tuntutan untuk re-layout untuk pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi dari *Joint Commission International* (akreditasi *health care*), Peraturan Menteri Kesehatan, INNOQUEST (*partnership*), dan Bapeten.
- b. Pengembangan Bisnis Petrokima Group TPPI terealisasi sebesar 100% dengan tanggapan atas Usulan Investasi Proyek Olefin Complex Tuban telah disampaikan Oleh Dewan Komisaris PT KPI dengan Surat Nomor R-016/K/DK-KPI/2024 tanggal 3 Oktober 2024. *Milestone* untuk target Q4 tidak berlanjut sesuai hasil rekomendasi ini, dan proyek dianggap selesai.
- c. Peningkatan Produksi dan *Reserve* Hulu terealisasi secara keseluruhan sebesar 104% dengan rincian realisasi pengeboran sumur eksploitasi terealisasi sebesar 105% (realisasi 821 vs target 781), kegiatan *workover* terealisasi sebesar 103% (realisasi 978 vs target 947), pengeboran sumur eksplorasi terealisasi sebesar 76% (realisasi 22 vs target 29). Sehingga, *overall* target terealisasi sebesar 1.821 sumur dari target sebesar 1.757 sumur atau sebesar 104%.
- d. Pengembangan Bioethanol terealisasi sebesar 78% untuk *groundbreaking* proyek ethanol plant Pertamina – PTPN. Ketidaktercapaian ini dikarenakan masih adanya pembahasan lebih lanjut terkait skema kerja sama apakah dilakukan pembentukan JV atau menggunakan entitas yang sudah ada (Enero).
- e. Implementasi Subsidi Tepat Sasaran terealisasi sebesar 100% dengan telah selesainya proses advokasi Perpres JBKP masih berjalan antara Pertamina dan Kementerian terkait dan sudah *roll out* uji coba JBKP sudah mencapai 317 kota/kabupaten.
- f. Pengembangan Geothermal terealisasi sebesar 100%, *agreement* dilakukan antara Pertamina dan PLN berupa *Power Purchase Agreement* (PPA) pada Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) *small scale. Commercial Agreement* telah selesai dilakukan pada 18 September 2024.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2024

- g. CCS/CCUS terealisasi sebesar 100% dengan telah selesai studi terhadap 10 proyek CCS/CCUS di Subholding *Upstream*.
- h. *Energy Transition Roadmap* (Green RUPTL) terealisasi sebesar 100% dengan telah dilaksanakan pembahasan draft RUPTL 2024-2033 tahap 2 bersama Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM pada 15-16 Oktober 2024.
- i. *Energy Transition Country Platform* terealisasi sebesar 33% dengan Penyampaian Dokumen Request for Proposal dan Model Power Purchase Agreement Program Dedieselisasi Tahap II. Proyek ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan menunggu Peraturan Presiden Transisi Energi serta belum disahkannya Draft RUPTL 2024-2033. Dengan belum disahkannya Draft RUPTL tersebut menyebabkan belum dapat dilaksanakannya PLTS Jawa 1 dan PLTB Jawa 550 MW.
- j. *EV Ecosystem Initiative* terealisasi sebesar 100% dengan Menteri BUMN pada tanggal 5 September 2024 telah menyetujui Tindakan pelepasan saham milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada IBC kepada pemegang saham IBC lainnya sehingga IKU dianggap tercapai 100%.
- k. KEK Sanur, secara keseluruhan tercapai 96,67% mendekati target 100%. Operasional Kawasan Ekonomi Khusus dan Kantor Pabean Khusus mencapai 100%, menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan. Lot operasional H1 dan H2 juga mencapai persentase tinggi, yaitu 95%. Adapun capaian yang belum optimal adalah pembangunan klinik (Lot H3 A, B, C; Lot H5 B; Lot H6) perlu mendapat perhatian lebih karena capaiannya masih di bawah target, yaitu 38% dari target 40%. Guna melakukan percepatan realisasi target tersebut, HIN terus melakukan koordinasi intensif dengan mitra/ tenant untuk percepatan pembangunan klinik.
- l. KEK Mandalika, secara keseluruhan tercapai 67,92% dengan operasional *ocean view* dan pembangunan kantor pabean khusus yang mencapai 100%. Adapun capaian yang belum optimal adalah pembangunan Dermaga Jetty hanya mencapai 5% dari target 100% dikarenakan adanya penundaan rencana kontruksi pada tahun 2024. Adapun selama 2024, ITDC berfokus pada pencarian pendanaan dan penyiapan desain dermaga. Selain itu, capaian ini juga dipengaruhi oleh permohonan penarikan pinjaman (fasilitas kredit) PKE NIA belum disetujui Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan Hotel Jambuluwuk juga belum mencapai target, dengan capaian 10% dari target 15%. Hal ini dikarenakan proses clear & clean lahan yang membutuhkan waktu cukup lama. Adapun proses yang sedang ditempuh selanjutnya adalah penyiapan desain, penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan rinci, dan proses perizinan pembangunan.
- m. Penyehatan keuangan Bio Farma Group, Bio Farma Group menghadapi tantangan yang signifikan, seperti potensi penurunan pendapatan akibat dinamika pasar global, likuiditas yang rendah, piutang macet, dan utang yang tinggi. Selain itu, model *parenting* masih terkendala peran terbatas Bio Farma sebagai induk, kinerja anak usaha yang belum optimal, portofolio produk yang kurang kompetitif dan *overlapping*, serta utilitas fasilitas produksi yang rendah yang masih harus dibenahi. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan stabilitas keuangan Bio Farma Group. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian BUMN berinisiatif untuk mendorong upaya penyehatan Bio Farma Group melalui restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis dengan dibentuknya *Project Management Officer* (PMO) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-20/MBU/01/2024 dan Nomor SK-19/MBU/01/2024.

- n. Bali International Hospital (BIH Sanur), sebagai salah satu bagian dari ekosistem Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur. Pembangunan BIH diharapkan dapat mengurangi devisa ke luar negeri untuk berobat dan meningkatkan pelayanan medis kepada masyarakat. BIH direncanakan beroperasi pada April 2025 dan pada tahap awal akan membuka layanan MCU, Hemodialisa, dan layanan Center of Excellence (CoE) di bidang kardiologi dengan 117 tempat tidur, 10-12 poliklinik, dan 4 ruang rawat inap. BIH saat ini telah menjalin *partnership* dengan berbagai pihak untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan dengan ICON untuk bidang *Oncology*, Innoquest untuk *laboratory*, Hong Kong Asia Medical (HKAM) untuk bidang *cardiology*, dan SingHealth untuk peningkatan kapasitas *knowledge and training*. Ketidaktercapaian program ini disebabkan oleh adanya temuan konstruksi yang tidak sesuai dengan kontrak awal sehingga dilakukan perubahan dan adendum kontrak *Detail Engineering Design*.
- o. Penyelesaian restrukturisasi keuangan PT Dirgantara Indonesia, telah dilaksanakan di bulan September 2024 (teralisasi 100%). PT Dirgantara Indonesia telah mendapatkan relaksasi arus kas dengan telah dilakukannya penandatanganan *Master Restructuring Agreement* (MRA) terhadap utang perbankan pada tanggal 2 September 2024 bersama BRI dan tanggal 26 September 2024 bersama BNI. Terhadap utang unsustain dibebankan biaya bunga sebesar 3,5% dengan tenor selama 10 tahun, sementara terhadap utang sustain dibebankan biaya bunga sebesar 3,5% (tahun ke-1 dan ke-2) dan 6,5% (tahun ke-3 sampai ke-10).
- p. Penyelesaian restrukturisasi keuangan PT PAL Indonesia, PT PAL dengan para kreditur terkait telah menyepakati usulan struktur restrukturisasi keuangan, dan telah melakukan pembayaran angsuran mulai dari bulan Februari 2024 sebagai syarat kenaikan status Kolektibilitas. Hingga Desember 2024 PT PAL telah melakukan pembayaran kepada kreditur sebesar Rp116,7 miliar.
- q. *Commencement* proyek pengoperasian kembali fasilitas *Iron & Steel Making – Blast Furnace* (ISM BF) dilakukan dengan menggandeng partner strategis asal Tiongkok,
- r. Baowu Group Zhongnan (BGZ) yang merupakan Produsen Baja terkemuka di global. Target *commencement* atau *groundbreaking* reaktivasi fasilitas ISM BF diharapkan akan terlaksana pada Kuartal IV 2024, namun hingga Desember 2024 realisasi proyek hanya sebesar 60%.

Dalam mencapai target persentase penyelesaian proyek SDU Tahun 2024, BUMN melalui pembinaan Tim Keasdepan Teknis Kementerian BUMN telah melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. *Monitoring* dan Evaluasi Progres Proyek SDU secara berkala guna memastikan penyelesaian.
- b. Mendorong percepatan penyelesaian Proyek SDU melalui berbagai aksi, contohnya percepatan originasi *project pipeline*, perjanjian kerja sama, pembahasan bersama dengan *stakeholder* terkait, dan sebagainya.
- c. Aktif berkoordinasi lintas sektoral dalam penyelesaian target SDU.
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian proyek SDU di tahun 2025, adapun hal yang akan dilaksanakan:
- a. Melakukan evaluasi atas proyek-proyek SDU disesuaikan dengan prioritas pemerintah.
- b. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Proyek SDU secara berkala.
- c. Meningkatkan dukungan koordinasi percepatan proyek SDU.
- d. Mendorong pembentukan *Task Force/Dedicated Team* yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan proyek SDU.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2024

- e. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek SDU dengan aksi-aksi utama seperti pelaksanaan kerja sama, pembahasan bersama *stakeholder*, dan sebagainya.
- f. Mendorong BUMN untuk mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

14. Presentase Perusahaan Negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep *Creating Shared Value* (CSV)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
% BUMN yang melakukan kegiatan berkonsep CSV	70,73%	90%	96%	120%	106,67%

Sebagai bentuk tanggung jawab BUMN kepada lingkungan dan sosial, BUMN telah melaksanakan Program TJSL BUMN yang berfokus dalam penanganan dampak dari aktivitas dan keputusan BUMN. Tabel Persentase Perusahaan Negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep CSV

Kementerian BUMN telah mendorong BUMN dalam pelaksanaan Program TJSL BUMN menggunakan pendekatan CSV. BUMN tidak hanya berkewajiban untuk beroperasi secara bertanggungjawab, tetapi juga memiliki kesempatan yang besar untuk dapat menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pendekatan CSV adalah ketika perusahaan yang menciptakan nilai bersama melalui penanganan sosial sebagai bagian dari strategi inti perusahaan untuk mencapai kapitalisasi pasar yang lebih tinggi dan keunggulan kompetitif yang bertahan lama.

Pada tahun 2024, terdapat 99 BUMN dari total 110 BUMN yang telah merealisasikan program TJSL BUMN dengan pendekatan CSV dengan total realisasi pendanaan sebesar Rp163 Miliar. Beberapa contoh Program TJSL BUMN yang dijalankan dengan pendekatan CSV pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut: (Analisa ketercapaian belum tersaji, perlu konfirmasi)

- a. PT Sarinah – *Injourney Creating House*;
- b. PT Industri Kereta Api (Persero) – Pelatihan *Welding* bagi Vokasi SMK Binaan;
- c. PT Jasa Raharja – Program Jasa Raharja *Road Safety Innovation*;
- d. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Desa BRILiaN

15. Jumlah Mitra Binaan yang Naik Kelas

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah Mitra Binaan yang Naik Kelas	n.a.	5.750	8.449	n.a.	120%*

*) capaian maksimal 120%

Jumlah Mitra Binaan (MB) naik kelas adalah MB yang pada akhir tahun berjalan mengalami peningkatan atas kriteria sebagai berikut:

- Peningkatan jumlah pegawai,
- Peningkatan nilai pinjaman,
- Peningkatan kapasitas produksi,
- Peningkatan omzet,
- Pelibatan masyarakat sekitar untuk menghasilkan produk,
- Pemasaran produk di luar kota/negeri,
- Memperoleh sertifikat nasional/internasional.

Peningkatan terjadi melalui pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh BUMN kepada UMK. Sejak ditetapkannya Surat Menteri BUMN Nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2023 tentang Kerja Sama Program Pendanaan UMK dimana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan pendanaan UMK, terhadap UMK tersebut yang mengalami kenaikan kelas di Tahun 2024 sebanyak 8.449 UMK atau 14,32% dari jumlah UMK *existing* posisi 31 Desember 2024 sebanyak 58.967 UMK.

Sasaran Strategis 8: Kontribusi BUMN dalam Peningkatan *Value* BUMN untuk Pemegang Saham

No	SS/IKU	Target	Realisasi	Capaian
16	<i>Net Profit</i>	Rp238,37 Triliun	Rp304 Triliun	120%*)

*) *capaian maksimal 120%*

16. *Net Profit*

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Jumlah <i>Net Profit</i> BUMN	Rp327,13 Triliun	Rp238,37 Triliun	Rp304* Triliun	100,17%	120%**)

*) Data *Unaudited* 2024

***) *capaian maksimal 120%*

Net profit merupakan salah satu tolak ukur utama kesehatan keuangan suatu perusahaan. Net profit yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuntungan yang baik dan salah satu indikator kondisi keuangan yang sehat. Net profit dapat membantu pemangku kepentingan untuk menilai posisi keuangan yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya, serta dapat melihat kekurangan bisnis dan mengembangkan rencana pertumbuhan bisnis ke depannya yang lebih terukur dan terarah.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2024

Sejak tahun 2021, Kementerian BUMN telah melakukan proses konsolidasi Laporan Keuangan seluruh BUMN sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN melalui *platform* Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN yang telah dilakukan reviu oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN tersebut telah memperhitungkan proses eliminasi transaksi pihak berelasi antar BUMN.

Realisasi *net profit* BUMN tahun 2024 (*Unaudited*) senilai Rp304 T atau tercapai 127,53% dari target 2024 seiring dengan peningkatan kinerja pada sebagian besar klaster. Ketercapaian ini juga didorong oleh peningkatan pendapatan pada sebagian klaster, kondisi perekonomian Indonesia yang perlahan mulai stabil dan pulih setelah kondisi Covid-19, dan langkah-langkah perbaikan portofolio yang dilakukan.

Pencapaian ini tidak luput dari kendala dan tantangan yang perlu dihadapi, diantaranya proses restrukturisasi beberapa perusahaan yang masih terus berjalan, melemahnya kurs Rupiah, serta meningkatnya beban pokok pendapatan pada beberapa klaster.

Perkembangan realisasi *net profit* BUMN dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian (Rp T)	2021	2022	2023	2024*
<i>Net Profit</i> Tanpa Eliminasi	126,86	341,10	323,08	300,14
<i>Net Profit</i> Dengan Eliminasi	124,71	308,99	327,13	303,57

*) Data *Unaudited* per 3 Februari 2025

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan capaian *net profit* sebesar 7,2% yang dikontribusikan dari penurunan pendapatan sebesar 6,6% menjadi Rp3.127 T, kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 9% menjadi Rp2.128 T, kenaikan beban bunga sebesar 12,8% menjadi Rp93 T, kenaikan pendapatan lain-lain sebesar 28,3% menjadi Rp87 T, kenaikan rugi kurs sebesar 240,2% menjadi -Rp8,8 T, dan kenaikan beban penurunan nilai sebesar 51,4% menjadi -Rp39 T. Kenaikan Beban Pokok Pendapatan utamanya pada Klaster Energi, Minyak, dan Gas, Jasa Keuangan, dan Telekomunikasi & Media. Selain itu terdapat pembalikan selisih kurs dari laba pada tahun 2023 menjadi rugi pada tahun 2024 pada Klaster Energi, Minyak, dan Gas serta kenaikan beban penurunan nilai yang utamanya berasal dari PT Pertamina (Persero). Namun demikian penurunan kinerja tersebut terimbangi dengan adanya peningkatan Pendapatan Lain-Lain utamanya pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Rekind yang berasal dari laba *non-cash* akibat PKPU, serta peningkatan serap laba PT Freeport.

Langkah-langkah efektif yang telah dilakukan sepanjang 2024 dalam mendorong pencapaian target yaitu:

- Menerbitkan Aspirasi Pemegang Saham untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 yang didalamnya memuat aspirasi untuk dapat melakukan ekspansi yang berkesinambungan yang diukur dengan parameter Ekspansi EBITDA/PPOP, CFO, *Net Profit*, dan Dividen.
- Melakukan kajian/pendalaman atas *draft* Kontrak Manajemen Tahun 2024 yang memuat target *Key Performance Indicator* Direksi BUMN secara kolegal untuk memastikan pencapaian sasaran-sasaran strategis BUMN, meningkatkan pengendalian kinerja BUMN, dan memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya.

- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, baik operasional maupun finansial.
- d. Memberikan evaluasi arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai target.
- e. Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja perusahaan antara lain melalui implementasi program strategis perusahaan dan mendorong efisiensi melalui pengendalian biaya.

Hal-hal yang perlu dilakukan di tahun berikutnya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu:

- a. Menerbitkan Aspirasi Pemegang Saham untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 yang didalamnya memuat aspirasi untuk dapat melakukan ekspansi yang berkesinambungan yang diukur dengan parameter Ekspansi EBITDA/PPOP, CFO, *Net Profit*, dan Dividen.
- b. Melakukan kajian/pendalaman atas *draft* Kontrak Manajemen Tahun 2025 yang memuat target *Key Performance Indicator* Direksi BUMN secara kolegal untuk memastikan pencapaian sasaran-sasaran strategis BUMN, meningkatkan pengendalian kinerja BUMN, dan memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, baik operasional maupun finansial.
- d. Memberikan evaluasi arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai target.
- e. Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja perusahaan antara lain melalui implementasi program strategis perusahaan dan mendorong efisiensi melalui pengendalian biaya

Realisasi Anggaran Kementerian BUMN

Pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp301.560.726.000, Realisasi anggaran Kementerian BUMN sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp297.110.608.999,- atau sebesar 98,49% dengan rincian sebagai berikut

No.	Unit Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Wakil Menteri BUMN	13.463.614.000	13.370.515.434	99,31%
2	Sekretariat Kementerian BUMN	203.320.769.000	199.626.007.830	98,18%
3	Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko	17.324.005.000	17.223.298.898	99,42%
4	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	4.274.739.000	4.190.552.902	98,03%
5	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi	63.177.599.000	62.600.894.681	99,09%
Total		301.560.726.000	297.110.608.999	98,49%

Perbandingan capaian realisasi anggaran 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	266.392.551.000	260.130.543.993	97,65
2	2021	193.047.600.000	190.942.482.059	98,91
3	2022	198.426.521.000	196.555.127.045	99,06
4	2023	241.525.168.000	238.074.180.645	98,57
5	2024	301.560.726.000	297.110.608.999	98,49

Selama 5 tahun terakhir, Kementerian BUMN secara konsisten memiliki capaian realisasi anggaran di atas 97,00%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Kementerian BUMN dalam mengimplementasikan Program Berbasis Anggaran berjalan secara efektif. Penggunaan Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2024 mendukung capaian output yang bersifat strategis pada tahun 2024, antara lain:

- Legal Opinion* atas Pelaksanaan Hukum Korporasi BUMN,
- Laporan Keuangan Gabungan BUMN,
- Rumusan Kebijakan Penetapan Dividen BUMN,
- Direksi dan Dewan Komisaris atan Dewan Pengawas BUMN Group yang ditetapkan sesuai ketentuan, dan
- Kebijakan Penguatan Daya Saing dan Penugasan BUMN.

Evaluasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, Kementerian BUMN melalui kontribusi kinerja 506 pegawai dapat meraih pencapaian indikator utama sebesar 103,6% dengan total penyerapan anggaran sebesar 98,49%. Berdasarkan pencapaian Kementerian BUMN tersebut dimana capaian IKU dapat terealisasi melebihi target dengan anggaran yang lebih rendah maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi dalam pencapaian kinerjanya.



LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN
TAHUN 2024



BAB IV PENUTUP

Penutup

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan dalam mencapai sasaran strategis Kementerian BUMN tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan. Adapun indikator yang belum tercapai disebabkan karena beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha, dan *civil society*. Capaian kinerja Kementerian BUMN tahun 2024 dapat dinyatakan “Sangat Memuaskan”, dari penilaian realisasi dari 16 IKU dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebanyak 7 IKU berhasil terealisasi di atas target;
2. Sebanyak 6 IKU berhasil terealisasi sesuai target; dan
3. Sebanyak 3 IKU terealisasi di bawah target.

Selama tahun 2024, Kementerian BUMN sebagai Pembina BUMN telah berhasil mendorong peningkatan kinerja BUMN khususnya pasca pandemi COVID-19. Hal ini tercermin pada perolehan laba bersih BUMN tahun 2024 mencapai sebesar Rp304 Triliun atau 127,53% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi dividen BUMN untuk Negara pada tahun 2024 berhasil mencapai Rp85,56 Triliun, meningkat Rp4,56 Triliun dari realisasi dividen tahun buku 2023.

Sebagai agen pembangunan nasional, BUMN berpartisipasi aktif untuk mendukung Pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan nasional. Salah satunya BUMN berperan aktif dalam penyelesaian proyek-proyek strategis nasional antara lain Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Kilang Minyak Tuban, Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I, dan lain-lain.

Pada tahun 2025, Kementerian BUMN akan semakin meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan BUMN dengan berpedoman pada visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. BUMN diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan menjadi BUMN yang maju baik di level domestik maupun di level internasional.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian BUMN untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian BUMN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 21 Maret 2025

Plt. Inspektur,

Sabar Wicaksono



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erick Thohir
Jabatan : Menteri BUMN

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Desember 2023

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



ERICK THOHIR



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Organisasi : KEMENTERIAN BUMN

Tahun Anggaran : 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
A Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional				
1	Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	1) Rasio Keterwakilan Talenta Muda dalam Direksi BUMN	Persen	11
2	Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	1) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	Predikat	Memuaskan
		2) Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	Opini	WTP
B. Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN				
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi	1) Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	Persen	50
		2) Persentase penyelesaian Program Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP)	Persen	50
4	Penguatan Kapasitas BUMN	1) Nilai PMN Non Tunai yang berasal dari Konversi Utang Pemerintah	Rp Triliun	0,65
C. Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN				
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	1) Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	Jumlah	54
6	BUMN Unggul di Kancah Global	1) Jumlah BUMN yang masuk peringkat Global (Forbes 2000 dan Fortune 500)	Jumlah	5
		2) Pembentukan Holding BUMN	Jumlah	1
D. Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan				
7	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	1) Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN)	Rp Triliun	630,63



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
8	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	1) Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp Triliun	318,61
		2) Persentase penyelesaian tahapan progress PSN untuk tahun 2024 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN	Persen	88,34
		3) Persentase penyelesaian tahapan progress Proyek SDU untuk tahun 2024 di luar PSN.	Persen	100
		4) Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep Creating Shared Value (CSV)	Persen	90
		5) Jumlah UMKM Mitra Binaan yang naik kelas	Jumlah	5750
9	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham	1) Net Profit	Rp Triliun	238,37

Program

1. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN
 2. Program Dukungan Manajemen
- Total Anggaran

Anggaran

Rp 96.733.024.000,00
Rp211.283.102.000,00
Rp308.016.126.000,00

Jakarta, 31 Desember 2023

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ERICK THOHIR



BUMN

TOWNHALL MEETING MENTERI BUMN

Jakarta, 12-13 Februari 2024



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Alamat :

Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, RT.11/RW.2,
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Website :

www.bumn.go.id